

KLIPING DIGITAL

Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) DI INDONESIA

(Maret sd Juli 2022)



Erik Kurniawan, S.I.Pust.

Pustakawan Mahir

PERPUSTAKAAN BBPSI VETERINER

BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

2023

Daftar Isi

No	Judul	Sumber	Waktu Penerbitan	Halaman
1.	RI Buka Lebar Impor Daging Sapi es, BUMN & Swasta Boleh Masuk	cnbcindonesia.com	04 Maret 2022	3
2.	Impor Daging Tanpa Rekom Kementan	agroindonesia.co.id	21 Maret 2022	6
3.	Berbahaya, Impor Tanpa Rekomendasi Teknis	agroindonesia.co.id	21 Maret 2022	8
4.	2.000 Ekor Sapi Impor Australia Tiba di Indonesia	republika.co.id	11 April 2022	12
5.	Penyakit Mulut dan Kuku Jangkiti Ternak di Jatim, Kementan Terjunkan Tim	kompas.id	06 Mei 2022	14
6.	Penyakit Mulut dan Kuku Kembali Mewabah di Jatim? Ini 3 Catatan dari Unair	tekno.tempo.co	08 Mei 2022	18
7.	Efek Domino Wabah Penyakit Mulut dan Kuku	jawapos.com	09 Mei 2022	20
8.	Wabah Serang Sapi Lokal Hingga Lockdown, Gegara Daging Impor?	cnbcindonesia.com	11 Mei 2022	23
9.	Populasi Ternak Terkonfirmasi PMK Meningkat, Pemotongan Hewan Diawasi Ketat	kompas.id	12 Mei 2022	26
10.	Wabah PMK Jangan Dibiarkan Meluas	kompas.id	13 Mei 2022	30
11.	5 Fakta Penyakit Kuku dan Mulut yang Sedang Mewabah di Indonesia	cnnindonesia.com	14 Mei 2022	33
12.	Yogyakarta Laporkan Dua Kasus PMK Pertama	cnnindonesia.com	16 Mei 2022	35
13.	1.247 Hewan Ternak di Jatim Terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku	cnnindonesia.com	16 Mei 2022	37
14.	Belajar dari Negara Lain dalam Mengendalikan Penyakit Mulut dan Kuku	kompas.id	16 Mei 2022	39
15.	Sampel Penyakit Mulut dan Kuku Akan Dikirim ke Laboratorium di Luar Negeri	tekno.tempo.co	20 Mei 2022	43
16.	PMK dan Pasar Daging Sapi	kompas.id	21 Mei 2022	45
17.	Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak dalam Pandangan Pakar FPP UNDIP	undip.ac.id	23 Mei 2022	48
18.	Ternyata Ini Penyebab Penyakit Mulut dan Kuku Masuk ke RI	finance.detik.com	25 Mei 2022	52
19.	Pusvetma Surabaya Siap Produksi Vaksin PMK	kominfo.jatimprov.go.id	30 Mei 2022	54
20.	Astaga! Ternyata PMK Sudah Masuk RI Lagi Sejak Tahun 2015	cnbcindonesia.com	14 July 2022	56

Judul : RI Buka Lebar Impor Daging Sapi cs, BUMN & Swasta Boleh Masuk

Penulis : Damiana Cut Emeria

Waktu : 04 Maret 2022

Sumber : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304154246-4-320106/ri-buka-lebar-impor-daging-sapi-cs-bumn-swasta-boleh-masuk>



Foto: Penjual daging sapi di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (23/2/2022). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah membebaskan impor ternak dan atau produk ternak tidak lagi hanya bisa dilakukan oleh BUMN, tapi juga swasta. Hal itu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) NO 11/2022 tentang Perubahan atas PP No 4/2016 tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Pemerintah memang memperluas kebijakan impor sapi/ kerbau dan produknya, tidak lagi berdasarkan negara (country base) tapi menjadi zona (zone base). Dengan begitu, impor tidak lagi bergantung hanya dari Australia dan Selandia Baru. Kebijakan ini ditetapkan dalam PP NO 4/2016.

Pasal 2 PP No 4/2016 menetapkan, dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan ternak dan/atau produk hewan.

Pasal 3 mengatur, kondisi tertentu dimaksud adalah keadaan akibat bencana dan perlunya cadangan stok ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga. Dimana pemasukan ternak dimaksud berupa sapi dan atau kerbau bakalan.

Pada pasal 5 terkait produk hewan dalam hal tertentu menambahkan kondisi tertentu dimaksud adalah tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Dimana, produk hewan dimaksud berupa daging tanpa tulang dari sapi atau kerbau.

Ketentuan ini mengizinkan impor bisa berasal dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) dan telah memiliki program pengendalian resmi diakui badan kesehatan hewan dunia.

Pada pasal 7 ditetapkan, pemasukan ternak dan atau produk ternak dilakukan oleh BUMN yang ditugaskan Menteri BUMN dan mendapat izin dari Menteri Perdagangan.

Kebijakan ini kemudian diubah dalam PP No 11/2022 dimana impor tidak lagi hanya bisa dilakukan oleh BUMN tapi juga pelaku usaha lainnya setelah memenuhi persyaratan tertentu.

Persyaratan dimaksud diatur oleh Menteri Perdagangan berdasarkan rapat koordinasi oleh Kemenko Perekonomian. Di sisi lain, Menteri Perdagangan bisa mengajukan tambahan impor melalui rapat koordinasi yang menetapkan neraca komoditas.

PP yang ditetapkandan diundangkan pada 24 Februari ini juga menambahkan ketentuan soal sanksi dan pengawasan. Dimana importir baik BUMN maupun swasta yang mendapat izin harus melakukan pengawasan berkala yang didalam timnya terdapat unsur Kementerian Perdagangan dan Pertanian.

Dan, jika melanggar, importir baik BUMN maupun swasta yang mendapat izin sesuai ketentuan PP No 11/2022 ini akan dikenakan sanksi administratif mulai peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha.



Foto: Detikcom, kerbau

Menanggapi terbitnya PP 11/2022, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perdagangan Juan Permata Adoe mengatakan, kebijakan itu positif dan membuka peluang bagi impor oleh swasta.

"Selama ini impor dari negara non konvensional seperti dari Australia dan Selandia Baru hanya bisa oleh BUMN. Sekarang, swasta bisa. Dengan begini jadi lebih bagus, persaingan pasar lebih sehat," kata Juan kepada CNBC Indonesia, Jumat (4/3/2022).

Hanya saja, lanjut dia, dalam teknis pelaksanaan, perlu kerja sama BUMN dan swasta. Dengan begitu, kata dia, tidak terjadi lonjakan harga semu di negara pemasok.

"Jadi, swasta berdiri di belakang BUMN, entah Bulog atau Berdikari. Dengan sepakat swasta beli dari BUMN. Jadi, swasta laporkan rencana pembelian, BUMN yang maju, langsung dijual ke swasta di dalam negeri. Jadi, tidak ada permainan harga oleh supplier. Nanti dikira karena dibuka impor pemainnya tambah banyak, permintaan naik, harga jadinya *dimainkan*, dinaikkan. Jadinya lebih mahal. Sebaiknya, swasta dan BUMN kerja sama," lanjut Juan.

Terkait pengawasan, imbuh dia, selama ini mekanisme dari Badan Karantina sudah berjalan.

"Nggak usah bingung, sudah ada Badan Karantina. Mereka punya data siapa saja perusahaan pemasok yang memenuhi syarat ekspor," ujarnya.

Judul : Impor Daging Tanpa Rekom Kementan

Penulis : Redaksi AgroIndonesia

Waktu : 21 Maret 2022

Sumber : <https://agroindonesia.co.id/impor-daging-tanpa-rekom-kementan/>



Foto: Antara

Pemerintah membuat keputusan berani dengan membuka keran impor daging sapi dan kerbau dari semua negara untuk menstabilkan harga daging, tanpa perlu rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2022, impor produk hewan, terutama daging kerbau, juga terbuka untuk swasta, tak lagi monopoli BUMN.

Stabilisasi harga pangan kembali membuat kejutan. Setelah kedele dan minyak goreng yang masih panas dikecam, kini stabilisasi harga daging juga berpotensi ramai. Pasalnya, untuk menstabilkan harga di pasaran yang terus tinggi, pemerintah membuka impor tanpa perlu rekomendasi dari Kementan. Padahal, rekomendasi ini penting karena menyangkut keterangan teknis bahwa produk daging, karkas ataupun jeroan yang diimpor memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, yang secara langsung atau tidak, bisa mempengaruhi kesehatan manusia.

Berdasarkan PP No. 11/2022 tentang Perubahan atas PP No. 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, ketentuan pasal 7 diubah. Jika semula impor produk hewan hanya monopoli BUMN (Perum Bulog dan PT Berdikari), kini swasta pun boleh mengimpor setelah memenuhi persyaratan tertentu. Nah, frase ‘persyaratan tertentu’ ini ternyata domain Kementerian Perdagangan, yang akan diturunkan dalam peraturan menteri.

Kemendag mengakui masih menyusun aturan mengenai persyaratan khusus yang harus dipenuhi importir swasta. “Nanti mungkin modelnya tender, di mana yang bisa suplai harga terendah ke konsumen itu yang akan kita kasih (izin) dulu,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen PLN) Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana, Rabu (16/3/2022).

Yang menarik, pasal 7 di PP 11/2022 juga tidak lagi mencantumkan rekomendasi pemasukan (impor) yang diterbitkan menteri pertanian. Padahal, sesuai PP 4/2016, BUMN yang ditugaskan mengimpor harus punya rekomendasi menteri

pertanian. Itu sebabnya, PP 11/2022 mendapat kritik tajam dari pengamat peternakan, yang juga dokter hewan, Sofjan Sudarjat. Mantan Dirjen Peternakan ini menilai impor hewan dan produk hewan tanpa rekomendasi teknis sangat berbahaya buat kelangsungan ternak di dalam negeri. “Kita khawatir impor produk ternak tersebut membawa penyakit, seperti PMK (Penyakit Mulut dan Kuku),” katanya saat dihubungi, Kamis (17/3/2020).

Sayangnya, pihak Kementerian Pertanian tak bisa dimintai komentarnya terkait PP 11/2022. Padahal, pihak *AgroIndonesia* sudah mencoba mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah dan Direktur Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin, namun tak ada yang menjawab.

Padahal, pelaku usaha malah menginginkan adanya rekomendasi teknis dahulu dari Kementan seperti yang berlaku saat ini. “Proses pengajuan izin impor didahului rekomtek dari dinas di kabupaten/kota kemudian ke provinsi lalu ke Kementan. Setelah itu, baru ke Kemendag untuk dikeluarkan izin impornya,” papar ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, yang juga pemilik PT Suri Nusantara Jaya.

Judul : Berbahaya, Impor Tanpa Rekomendasi Teknis

Penulis : B Wibowo

Waktu : 21 Maret 2022

Sumber : <https://agroindonesia.co.id/berbahaya-impor-tanpa-rekomendasi-teknis/>



daging kerbau impor dari eksportir Allana Group, eksportir pangan olahan dan komoditas agro terbesar India.

Kebijakan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2022 mengundang tanya terkait hilangnya persyaratan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian buat importir yang ingin memasukkan atau mengimpor produk hewan. PP yang ditandatangani Presiden Jokowi dan diundangkan pada 24 Februari 2022 ini juga membuka kesempatan swasta ikut mengimpor dan menghapus monopoli BUMN, dalam hal ini Perum Bulog dan PT Berdikari.

Sesuai namanya, PP 11/2022 merupakan perubahan atas PP No. 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan. Namun, pasal yang diubah ternyata sangat krusial, yakni masuknya pihak swasta untuk mengimpor ternak dan produk hewan, terutama kerbau, yang selama ini monopoli BUMN.

Bahkan, seiring masuknya swasta, pemerintah juga meniadakan kewajiban rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian. Padahal, dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan, BUMN yang menjalankan tugas mengimpor ternak atau produk hewan harus memiliki rekomendasi pemasukan yang diterbitkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, dalam PP 11/2022, aturan itu tak ada lagi.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Nisrina Nafisah menilai, pemerintah memang perlu mengevaluasi regulasi impor daging supaya dapat merespons kebutuhan pasar dengan cepat. Sebab, harga daging sapi mengalami kenaikan tajam sejak awal tahun dan ini perlu segera diatasi sebelum memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri, di mana kenaikan permintaan biasanya terjadi.

“Regulasi perlu direvisi supaya menyederhanakan proses untuk mendapatkan izin impor. Proses tersebut seharusnya cukup hanya fokus pada pemeriksaan kualitas dan identifikasi impor secara cepat dan wajar,” ujar Nisrina, Selasa (15/3/2022).

Nisrina mengatakan, salah satu regulasi yang perlu dievaluasi adalah yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 59 Tahun 2016, pasal 10 ayat 1 dan pasal 11. Permendag ini mewajibkan importir untuk memiliki izin impor sebelum mengimpor daging sapi dan hewan ternak di Indonesia.

Izin tersebut baru keluar setelah importir melengkapi lima dokumen, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan, Sertifikasi Registrasi Kepabeanan, Angka Pengenal Impor, Rekomendasi dari Menteri Pertanian dan Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan.

“Waktu yang dibutuhkan, mulai dari pengajuan hingga keluarnya izin impor relatif lama, yaitu antara satu hingga tiga bulan. Hal inilah yang dinilai membuat para importir seringkali kehilangan momen yang tepat untuk mengimpor daging dengan harga murah,” ujarnya.

Regulasi lainnya yang perlu dievaluasi adalah Permendag No. 59 tahun 2016, terutama pasal 19, karena menghambat masuknya daging impor ke pasar tradisional. Mengingat pasar komoditas pangan di Indonesia didominasi oleh pasar tradisional, sebanyak 70,5%, peraturan ini menghalangi akses sebagian besar masyarakat terhadap daging berkualitas dengan harga murah.

Penelitian CIPS merekomendasikan, pemerintah perlu memastikan regulasi yang ada dapat mengakomodir seluruh importir daging sapi yang memenuhi syarat, baik swasta maupun BUMN, supaya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengimpor.

“Untuk memberikan perlindungan pada konsumen terkait risiko penyakit hewan, pemerintah lebih baik fokus pada peningkatan kinerja sistem pemantauan kesehatan daripada membatasi impor hanya untuk BUMN,” cetusnya.

Berbahaya

Namun, hilangnya rekomendasi teknis mendapat kritik tajam dari pengamat peternakan, yang juga mantan dirjen peternakan, Sofjan Sudarjat. Dia menegaskan, impor produk hewan dan ternak tidak berdasarkan rekomendasi teknis akan sangat berbahaya untuk kelangsungan hewan ternak di dalam negeri.

“Kita khawatirkan impor produk ternak tersebut membawa penyakit seperti PMK (Penyakit Mulut dan Kuku),” katanya kepada *AgroIndonesia*, Kamis (17/3/2020).

Dia menuturkan, pada saat menjabat dulu, tidak hanya produk hewan dan ternak saja yang dipersyaratkan menggunakan rekomendasi teknis, tapi produk tanaman pangan seperti jagung juga disyaratkan.

“Dulu, kalau mau impor produk pertanian, terutama ternak, sangat ketat. Ini dilakukan untuk menjaga agar hama penyakit dari luar tidak masuk ke Indonesia,” tegasnya.

Menurut Sofjan, jika PP 4/2016 sudah diubah, maka bisa mengacu pada aturan yang lebih tinggi, yakni UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. UU ini sudah diubah oleh UU 41 Tahun 2014 tentang perubahan UU 18/2009, yang diubah lagi dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Dalam UU 18/2009, pasal 59 menyebutkan setiap orang yang akan memasukkan produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari menteri yang terkait di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi: a. untuk produk hewan segar dari Menteri. Menteri di sini adalah menteri pertanian. Bunyi pasal ini juga tidak berubah dalam UU 41/2016.

Namun, dalam UU Ciptaker ini, pasal 59 ini diubah sehingga berbunyi “(1)Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Nah, analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesmavet ini biasanya dicakup dalam rekomendasi pemasukan. Itu sebabnya, rekomendasi itu penting karena menyangkut keterangan teknis bahwa produk daging, karkas ataupun jeroan yang diimpor memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, yang secara langsung atau tidak, bisa mempengaruhi kesehatan manusia. **Attiyah Rahma/Jamalzen**

Kadin Minta Tetap Ada Rekomendasi Kementan

Meskipun belum ada kebijakan resmi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait izin impor produk hewan (daging) pasca lahirnya PP No. 11/2022 , namun saat ini sudah ada importir swasta yang menyampaikan permohonan untuk persetujuan impor daging. “Izin impor masih bergerak terus, jadi alokasi masih tergantung dari permohonan,” ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana, Rabu (16/3/2022).

Hal ini terkait dengan pembahasan persyaratan tertentu buat swasta yang ingin mengimpor produk hewan sesuai PP No. 11/2022, pasal 7 ayat (2). “Nanti mungkin modelnya tender yang bisa suplai harga terendah ke konsumen itu yang akan kita kasih (izin) dulu,” katanya.

Rencana Kemendag menerapkan pola tender ini didukung Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi. “Saya setuju jika aturan itu diterapkan,” ujar Diana kepada *AgroIndonesia*, Jumat (18/3/2022).

Dia mengapresiasi rencana pemerintah merealisasikan PP 11/2022, di mana pihak swasta akan diberi porsi izin importasi. Meski demikian, pemilik PT Suri Nusantara Jaya (SNJ) ini — salah satu importir dan distributor utama daging — meminta pemerintah sangat memperhatikan sejumlah hal dalam melakukan tender kuota impor daging.

“Harus ada instansi yang mengecek *track record* perusahaan tersebut. Tidak hanya memenangkan tender dengan menyatakan akan memberikan harga termurah, tetapi kriteria lain penting artinya, yaitu *track record* (rekam jejak) perusahaan harus benar benar dinilai,” ucapnya.

Diana meminta importir swasta yang akan mengikuti tender kuota impor daging harus memenuhi sejumlah persyaratan yang menjamin kegiatan impor dan distribusi di dalam negeri dapat berjalan sesuai yang ditetapkan pemerintah. “Perusahaan yang akan ikut tender harus punya *capital* yang cukup dengan disertai dokumen lengkap referensi dari perbankan ternama,” paparnya.

Yang tidak kalah penting, ungkapnya, adalah perusahaan tersebut harus mempunyai fasilitas rantai pasok dan logistik yang kuat sehingga penjualan daging dapat menjangkau konsumen secara luas.

Nah, yang menarik, dia juga meminta proses pengajuan impor tetap dilakukan seperti saat ini, di mana harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan) terlebih dulu.

“Proses pengajuan izin impor didahului rekomtek dari dinas di kabupaten/kota kemudian ke provinsi lalu ke Kementan. Setelah itu baru ke Kemendag untuk dikeluarkan izin impornya,” papar Diana menjelaskan alur mendapatkan izin impor daging.

Dalam menghadapi permintaan konsumen yang dipastikan akan meningkat selama Bulan Ramadhan dan jelang Hari Raya Idul Fitri, Diana menyatakan dia dan perusahaan swasta lainnya sudah terbiasa mempersiapkan kebutuhan stok menghadapi hari raya keagamaan untuk pelanggan dan juga telah mempunyai angka kebutuhan masing-masing perusahaan dalam rangka memenuhi pelanggannya dalam masa itu. “Periode tersebut berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” ucapnya.

Dia yakin, dengan persiapan yang matang dari semua *stakeholder* yang ada, tidak akan ada kelangkaan stok daging saat menghadapi Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. “Terlebih alokasi kuota impor daging yang ditetapkan pemerintah saat ini cukup besar dan saya kira itu lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri,” pungkas Diana Dewi.

REPUBLIKA

Judul : 2.000 Ekor Sapi Impor Australia Tiba di Indonesia

Penulis : Nora Azizah

Waktu : 11 April 2022

Sumber : <https://ekonomi.republika.co.id/berita/ra6hb7463/2000-ekor-sapi-impor-australia-tiba-di-indonesia>

Sapi impor didatangkan langsung dari Queensland, Australia.



Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Pemerintah Indonesia kembali mendatangkan sapi impor Australia dalam rangka menjaga stabilitas pasokan daging untuk memenuhi stok.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia kembali mendatangkan **sapi impor** Australia dalam rangka menjaga stabilitas pasokan daging untuk memenuhi stok selama hari besar keagamaan nasional mulai dari Ramadhan, Idul Fitri, maupun Idul Adha. Ribuan sapi impor itu telah tiba di Indonesia hari ini melalui Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara.

"Jumlah sapi hidup yang datang ini kurang lebih sekitar 2.000 ekor, sebagian turun di sini dan sebagian turun di Lampung. Ini berangkat dari Queensland," kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (11/4/2022).

Arief menjelaskan, ribuan sapi hidup impor ini untuk mendukung kebutuhan daging selama Ramadhan dan Lebaran. Beberapa sapi impor yang baru datang hari ini akan dilakukan penggemukan dua sampai tiga bulan ke depan untuk kebutuhan Idul Adha dan ada juga sapi yang siap untuk dikirim ke sentra-sentra untuk memenuhi kebutuhan saat puasa dan Lebaran.

Meski pemerintah mendatangkan sapi dari luar negeri, namun sebagian pengadaan dari dalam negeri juga menjadi kunci pemenuhan kebutuhan sapi di Indonesia, di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga dalam waktu dekat Kupang dan Sumbawa. Pemerintah memfokuskan ketersediaan daging sapi untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Bandung Raya karena harga daging sapi daerah ini sering bergejolak.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah menambahkan kedatangan ribuan sapi impor dari Australia ini akan mengintervensi kebutuhan daging sapi untuk wilayah-wilayah defisit ataupun harga

bergejolak. Selain itu, ketersediaan sapi lokal yang mencapai lebih kurang 200 ribu ekor akan dilakukan mobilisasi untuk Ramadhan dan Idul Fitri.

"Masyarakat Indonesia tidak usah khawatir stok ketersediaan daging Insya Allah sampai minimal Idul Fitri nanti," kata Nasrullah.

Pada 2022, Kementerian Pertanian telah menetapkan neraca daging sapi maupun kerbau nasional dengan tingkat konsumsi diperkirakan sebesar 2,57 kilogram per kapita per tahun atau 706 ribu ton secara nasional. Kemampuan produksi dalam negeri saat ini diproyeksikan hanya 436 ribu ton dan stok awal tahun 62 ribu ton, sehingga masih di bawah dari kebutuhan. Pemerintah lantas menargetkan harus terdapat stok sisa akhir tahun sebesar 58,8 ribu ton, sehingga diperoleh defisit daging sebesar 266 ribu ton akan dipenuhi melalui mekanisme impor.

Judul : Penyakit Mulut dan Kuku Jangkiti Ternak di Jatim, Kementan Terjunkan Tim

Penulis : Aditya Putra Perdana

Waktu : 6 Mei 2022

Sumber : <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/05/06/penyakit-mulut-dan-kuku-mewabah-di-jatim-kementan-terjunkan-tim>

Kepala Dinas Peternakan Jatim Indyah Aryani kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kamis (5/5/2022), melaporkan wabah PMK. Sebanyak 1.247 ekor ternak di Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto, terjangkit PMK.



Kompas/Anger Putranto

Petugas Veteriner bersiap menyuntikkan vitamin untuk sapi-sapi milik peternak di Kelurahan Boyolangu, Banyuwangi, Selasa (16/6/2020). Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Banyuwangi menggelar pengobatan gratis sebagai upaya pencegahan penyakit menular pada sapi-sapi indukan yang nantinya akan menghasilkan bibit-bibit sapi untuk didistribusikan di seluruh Jawa Timur.

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 1.247 ekor sapi di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto di Jawa Timur dilaporkan terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku. Kementerian Pertanian telah menerjunkan tim untuk menginvestigasi kejadian ini. Penanganan serius dan segera mendesak dilakukan karena hal wabah ini bisa berdampak pada ketahanan pangan.

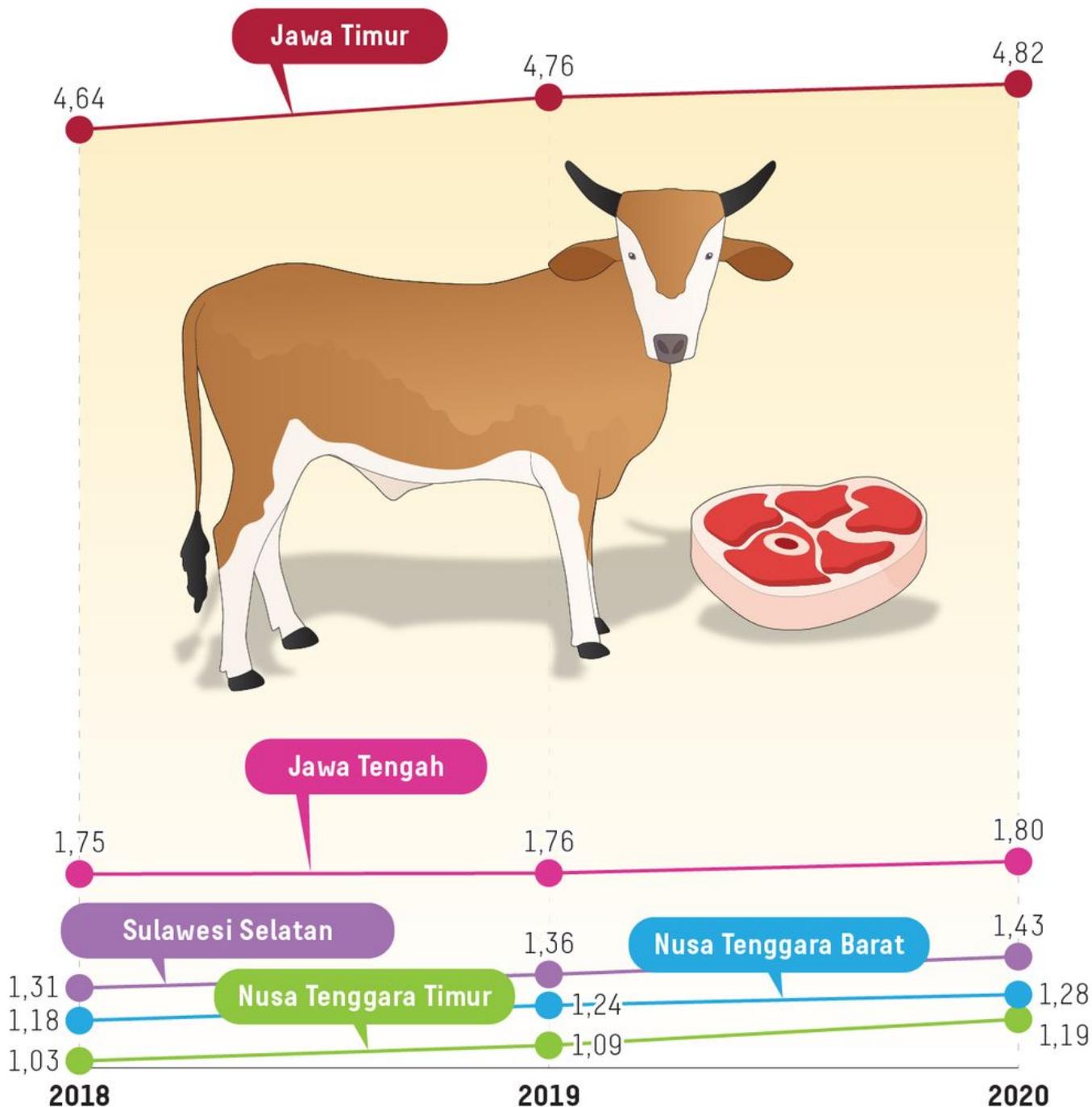
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian Nasrullah, Jumat (6/5/2022), mengatakan, pihaknya sudah merespons kejadian itu. "Tim kami lagi di lapangan untuk investigasi dan lagi dianalisis di laboratorium sampel-sampel yang diduga terinfeksi," ujarnya lewat pesan singkat.

Ia tak merinci upaya serta investigasi yang dimaksud. Nasrullah meminta waktu agar informasi yang dikumpulkan oleh Kementan bisa lebih lengkap. "Biarkan tim kami kerja dulu di lapangan, biar nanti informasinya komprehensif," katanya.

Sebelumnya, wabah diketahui dari laporan Kepala Dinas Peternakan Jatim Indyah Aryani kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kamis (5/5/2022). Laporan tersebut tentang kejadian penyakit menular akut pada ternak di Jatim.

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Menyerang 1.247 Ternak di Jawa Timur

Lima Provinsi dengan Populasi Sapi Potong Terbanyak 2018-2020 (juta ekor)



Sumber: Kementerian Pertanian

INFOGRAFIK: TIURMA

Disebutkan, pada 28 April 2022 penyakit mulut dan kuku (PMK) menyerang 402 sapi potong di 22 desa dalam lima kecamatan di Gresik. Lalu pada 1 Mei 2022, PMK wabah menyerang 102 sapi potong di enam desa dalam tiga kecamatan di Lamongan serta 595 sapi potong, sapi perah, dan kerbau di 14 desa dalam 11 kecamatan di Sidoarjo. Adapun pada 3 Mei 2022, dilaporkan PMK menyerang 148 sapi potong di 19 desa dalam sembilan kecamatan di Mojokerto.

Dinas Peternakan Jatim sendiri telah berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner dan Pusat Veterinaria Farma untuk pengambilan sampel guna peneguhan diagnosa penyakit. Juga dilakukan pengobatan simtomatis pada ternak yang sakit dan mencegah penyebaran dan potensi penjualan panik (panic selling) (Kompas.id, Jumat 6/5/2022).

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada 2020, Jawa Timur merupakan provinsi dengan populasi sapi potong terbanyak, yakni 4,82 juta ekor. Disusul Jawa Tengah dengan 1,8 juta ekor, Sulawesi Selatan 1,43 juta ekor, Nusa Tenggara Barat (NTB) 1,28 juta ekor, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 1,19 juta ekor.

Perkuat koordinasi

Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Ali Usman mengatakan, pemerintah harus melakukan langkah cepat, termasuk dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Jangan sampai wabah tersebut meluas ke daerah-daerah lain ataupun provinsi lain. Apalagi Jatim merupakan provinsi dengan populasi sapi potong terbanyak.

Penjualan panik juga harus diantisipasi. Selain dikhawatirkan memperluas penyebaran PMK, harga sapi hidup pun berpotensi anjlok hingga lebih dari 50 persen. "Peternak pun akan merugi, sedangkan mereka harus memenuhi kebutuhan seperti membiayai sekolah anak-anaknya. Di sisi konsumen, perlu diantisipasi dengan pemahaman kepada masyarakat. Sebab, nanti warga jadi enggan membeli daging sapi," kata Ali.



Kompas/Bahana Patria Gupta (Bah)

Calon pembeli di kandang sapi kurban di Jalan Kedung Baruk, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (23/7/2020). Pemilik usaha Setiawan Basuki mengungkapkan bahwa pada tahun ini sengaja menghadirkan SPG untuk membantu penjualan sapi kurban dan menghadirkan suasana yang berbeda. Sapi-sapi di tempat tersebut dijual Rp 17 juta hingga Rp 60 juta.

Pemerintah, imbuh Ali, juga harus melakukan penelusuran dan pengecekan terkait dari mana awal mula penularan penyakit tersebut, termasuk apakah ada kelemahan dalam transaksi antarnegara. Di samping itu, program pencegahan berupa vaksinasi pada ternak-ternak lainnya juga mesti digencarkan.

Pengaruhnya bukan hanya gejala atau masalah harga di dalam negeri. Namun, juga berkaitan dengan isu ketahanan pangan yang tantangannya harus dijawab.

Apabila kondisi pada ternak maupun situasi wabah PMK ini semakin memburuk, stamping out atau pemusnahan menjadi satu-satunya pilihan. "Itu untuk menekan penyebaran dengan cepat. Namun, populasi memang akan berkurang. Jadi, koordinasi harus segera dilakukan agar populasi di daerah aman untuk memenuhi kebutuhan," ujar Ali.

Penanganan wabah ini mesti dilakukan dengan serius. "Sebab pengaruhnya bukan hanya gejolak atau masalah harga di dalam negeri. Namun, juga berkait dengan isu ketahanan pangan yang tantangannya harus dijawab. Jika pasokan dalam negeri berkurang, nantinya lagi-lagi impor untuk memenuhi kebutuhan," katanya.

Menurut Ali, hal ini pun harus menjadi pelajaran agar pemerintah tidak sebatas reaktif, tetapi proaktif dalam mencegah penularan penyakit pada ternak. Check Point sebagai pos pemeriksaan lalu lintas ternak harus dijalankan dengan baik sehingga PMK pada hewan ternak dapat dihindari sedini mungkin.

Judul : Penyakit Mulut dan Kuku Kembali Mewabah di Jatim? Ini 3 Catatan dari Unair

Penulis : Zacharias Wuragil

Waktu : 8 Mei 2022

Sumber : <https://tekno.tempo.co/read/1589474/penyakit-mulut-dan-kuku-kembali-mewabah-di-jatim-ini-3-catatan-dari-unair>



Petugas memeriksa kesehatan gigi dan mulut ternak sapi di salah satu sentra penggemukan ternak sapi di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis, 23 Juli 2020. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan ternak sapi maupun kambing yang diperjualbelikan untuk hewan kurban pada Idul Adha nanti dalam kondisi sehat, layak disembelih dan tidak memiliki penyakit bawaan yang bisa menular pada manusia. ANTARA FOTO/Destyana Sujarwoko

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar bidang ilmu biokimia dan biologi molekuler di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Chairul Anwar Nidom, memberi sejumlah catatan atas laporan wabah **penyakit mulut dan kuku** pada ternak sapi di Jawa Timur. Dia merujuk kepada surat Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur Indyah Aryani kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa tertanggal 5 Mei 2022.

Isi surat melaporkan adanya *outbreak* (wabah) penyakit menular yang telah menyerang 1.247 ekor ternak sapi di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto. Landasannya adalah surat Kepala Pusat Veterinaria Farma No.: 05001/PK.310/F4.H/05/2022 tentang Jawaban Hasil Uji Sampel *Suspect* PMK (penyakit mulut dan kuku).

Surat itu menyertakan kronologi laporan kasusnya yang diterima dalam rentang 28 April sampai 3 Mei dari empat daerah, dengan sebaran 28 kecamatan dan 61 desa. Selain juga tindakan yang telah dan sedang dilakukan dalam rangka pengendalian wabah penyakit itu.

Menurut Nidom, Gubernur Jawa Timur Khofifah sejatinya tidak terburu-buru menerima kondisi seperti isi surat itu. Alasannya bukan sekadar Indonesia yang sudah dinyatakan bebas Penyakit Mulut & Kuku sejak 1986.

Pertama, dia memandang format surat yang kurang lazim, jika dikaitkan dengan tanggal surat dan kronologi kejadian yang disertakan. Berdasarkan kronologi itu, dia mengamati, kejadian di lapangan berdekatan di beberapa kabupaten,

dengan sejumlah besar sampel yang dinyatakan telah diuji. Pendiri Laboratorium Profesor Nidom Foundation itu meragukannya.

"Pengujiannya dalam waktu singkat..ditambah masih periode cuti nasional. Seandainya disampaikan metoda yang digunakan, akan lebih jelas lagi," katanya lewat aplikasi pesan WhatsApp, Sabtu 7 Mei 2022.

Belum lagi untuk metode pengujiannya. Ini adalah catatan keduanya. Meskipun metode dengan protein virus dan serologis telah diakui, menurut Nidom, tetap diperlukan uji konfirmasi menggunakan metode PCR atau isolasi virus. Metode ini disebutnya butuh fasilitas minimal laboratorium *biosafety level 3*.

"Kalau hanya positif berdasarkan uji lain, sifatnya masih suspek atau dugaan," katanya sambil menambahkan, "Informasi (metode pengujian) ini belum jelas."

Pernyataan Indonesia bebas penyakit mulut dan kuku sejak 1986, Nidom menuturkan, juga berarti kasus sekarang menjadi uji pertama yang dilakukan Pusat Veterinaria Farma. Dia berharap hasil uji itu, yang telah dirilis dan menjadi landasan surat 5 Mei lalu, sudah mendapatkan uji banding baik dari laboratorium dalam negeri maupun luar negeri.

Catatan ketiga diberikannya tentang keterbukaan informasi dan kecepatan langkah yang diperlukan. Dia mengaku memahami kebutuhan itu namun, diperingatkannya pula kalau kurang-cermatan terhadap proses identifikasi penyakit baru atau muncul kembali bisa berdampak negatif bukan hanya kepada aspek teknis kesehatan hewan dan kaitan dengan kesehatan manusia.

"Tetapi pada aspek sosial-ekonomi," katanya. Nidom menambahkan, "Semoga informasi wabah ternak tidak menambah permasalahan nasional, pandemi, yang masih belum bebas."



Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat mengecek hewan ternak di salah satu area kandang sapi di wilayah setempat. Kepala Dinas Peternakan, dalam suratnya kepada Gubernur Jawa Timur 5 Mei 2022, mengungkap wabah penyakit mulut dan kuku merebak di Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto. ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengumumkan upaya penanggulangan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang telah ditemukan pada hewan ternak di empat kabupaten, yaitu Mojokerto, Lamongan, Sidoarjo dan Gresik. Di antaranya adalah menutup sementara pasar hewan dan kombinasi pemusnahan-vaksinasi.

"Kalau memakai *stamping out*, beban anggaran akan tinggi karena kami harus memberi kompensasi. Jadi, dipakai metode kombinasi, yaitu *stamping out* dan vaksinasi secara bersamaan," kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Judul : Efek Domino Wabah Penyakit Mulut dan Kuku

Penulis : Dhimas Ginanjar

Waktu : 9 Mei 2022

Sumber : <https://www.jawapos.com/opini/01385198/efek-domino-wabah-penyakit-mulut-dan-kuku>



BELUM usai masalah penyakit kulit bernama lumpy skin disease pada sapi-sapi di Riau, kini di Indonesia dipastikan terjadi wabah (outbreak) **penyakit mulut dan kuku** (food and mouth disease). Wabah terjadi di empat kabupaten di Jawa Timur: Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto. Kepastian ini diketahui dari laporan Dinas Peternakan Jawa Timur kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa 5 Mei 2022. PMK dipastikan telah menyerang 1.247 ekor sapi di empat kabupaten itu.

Kabar ini amat mengagetkan, terutama bagi dunia pertanian, khususnya subsektor peternakan. Di saat pemerintah masih berjuang dengan meracik aneka jurus untuk meraih swasembada daging sapi, wabah PMK adalah pukulan telak. Bukan saja ini menandai kemunduran subsektor peternakan: dari bebas kini kembali terjangkit PMK. Tetapi, wabah membuat aneka upaya yang telah diukir berpuluh tahun seolah sia-sia belaka. Bagai panas setahun disapu hujan sehari. Ini karena wabah PMK membawa implikasi dan efek domino yang luas bagi perekonomian regional-nasional saat ini dan ke depan.

Pertama, PMK adalah pukulan telak bagi subsektor peternakan Jawa Timur. Jawa Timur adalah produsen utama daging sapi. Sebanyak 4,938 juta dari 18 juta ekor total populasi sapi di Indonesia pada 2021 berada di Jawa Timur. Ini berarti 27,4% populasi sapi nasional ada di Jawa Timur. PMK akan membuat harga sapi dan daging sapi di Jawa Timur anjlok. Kemungkinan juga terjadi panic selling dengan banting harga. Jika situasi darurat ini tidak mampu dikelola dengan baik akan menimbulkan chaotic. Ujung-ujungnya, peternak kecil sebagai produsen akan menjadi pihak yang paling dirugikan.

Kedua, PMK membuat populasi sapi akan berkurang. Bukan saja karena kematian ternak sapi, salah satu langkah efektif menangani wabah ini adalah eradikasi ternak yang terjangkit. Seberapa besar penurunan populasi amat bergantung pada berapa banyak sapi yang terjangkit dan perlu dimusnahkan. Tatkala populasi sapi di Jawa Timur menurun, populasi sapi nasional juga akan anjlok. Ini berarti jumlah potensial sapi yang siap potong makin turun. Dampak berikutnya, target

swasembada sapi akan kian jauh. Artinya, ketergantungan Indonesia pada daging impor akan lebih tinggi dari saat ini: 35%.

Ketiga, devisa impor daging sapi semakin tinggi. Ini konsekuensi dari volume impor daging sapi yang kian besar. Memang benar dengan status negara terjangkit PMK, Indonesia bisa bebas mengimpor daging sapi dari negara-negara yang berstatus serupa seperti India. Indonesia punya banyak alternatif asal impor. Harga daging sapi dari negara-negara yang belum bebas PMK lebih rendah dari negara yang bebas PMK. Tetapi, kala volume impor naik, ujung-ujungnya devisa yang dibelanjakan juga akan naik.

Keempat, Indonesia harus siap menghadapi penolakan komoditas di negara tujuan ekspor. Ini sangat mungkin terjadi. Negara-negara yang bebas PMK seperti Australia, Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru tentu tak akan ceroboh memasukkan impor komoditas dari Indonesia. Mereka khawatir komoditas asal Indonesia itu tercemar PMK. Kalaupun penolakan tidak terjadi, Indonesia harus siap-siap memberikan harga diskon.

Kasus PMK di Inggris tahun 2001 bisa jadi cermin. Hanya dalam 14 hari, jumlah ternak yang dimusnahkan 4,22 juta ekor (meliputi domba, sapi, babi, kambing, rusa, dan ternak lainnya). Kasus ini menurunkan pendapatan usaha ternak hingga 71%, hotel dan restoran 52%, pertanian 58%, perdagangan (pedagang besar dan ritel) 47%, industri manufaktur 42%, transportasi 42%, jasa dan pelayanan 55%, bisnis finansial 23%, serta konstruksi 49% (Tawaf, 2016). Outbreak di Inggris memangkas pendapatan peternak Rp 1 triliun/bulan, ekspor produk peternakan menurun Rp 9,45 triliun/tahun, dan menurunkan pendapatan sektor pariwisata Rp 82,5 triliun/tahun (Hutabarat, 2002).

Oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE), PMK dimasukkan sebagai penyakit hewan paling berbahaya dan ada di daftar A. Virus PMK sangat mudah menyebar. Lagi-lagi di Inggris, hanya dua minggu virus sudah menyebar di seantero Inggris Raya. Ini karena virus bisa menyebar lewat udara (air borne diseases) dan mampu menempuh jarak hingga 200 kilometer. Sebagai negara kepulauan, Indonesia bisa jadi diuntungkan. Tetapi, dengan kemampuan jelajah demikian jauh, tak ada jaminan virus PMK di Jatim tidak menyebar ke pulau-pulau lainnya jika pergerakan hewan-barang tak dibatasi.

Bobolnya kembali Indonesia oleh PMK adalah buah keteledoran. Keteledoran itu tecermin dari mudahnya mengganti aturan hukum hanya untuk kepentingan sesaat dan jangka pendek. Di UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, hasil uji materi di Mahkamah Konstitusi menganut pendekatan maximum security: sistem impor berbasis negara (country base) bebas PMK. Lewat "perselingkuhan" DPR dan pemerintah, pendekatan ini diubah menjadi berbasis zona (zone base) di UU 41/2014. Alasannya, sistem country base membuat ketergantungan Indonesia pada Australia makin tinggi. Adalah benar tak mudah mencari negara eksportir daging sapi bebas PMK. Ini membuat daging sapi impor Indonesia hanya dipasok dari Australia dan Selandia Baru.

Akibat kecerobohan itu akhirnya kita tuai saat ini. Tak terhitung berapa kerugian yang akan Indonesia tanggung. Kerugian ekonomi Indonesia menangani PMK selama 100 tahun (1887–1986), menurut Ditjen Peternakan (2002), mencapai USD 1,66 miliar (Rp 29 triliun). Ini tidak kecil. Agar implikasi dan efek domino tidak semakin besar, perlu langkah segera. Pertama, pemerintah pusat dan instansi terkait perlu segera mengambil langkah konkret dan keras guna

menghambat laju penularan PMK dari Jawa Timur ke provinsi lain. Di daerah wabah, pasar ternak mesti ditutup. Pergerakan ternak diawasi.

Kedua, eradikasi ternak terjangkit. Agar tidak merugi, peternak harus diberi ganti rugi. Ketiga, vaksinasi ternak di sekitar daerah wabah. Keempat, hentikan impor semua hewan dan produk hewan dari negara yang belum bebas PMK seperti daging kerbau dari India. Kelima, periksa semua daging impor yang berada di gudang atau dalam peredaran. Keenam, lacak daging impor yang ditengarai membawa PMK. Ketujuh, menyediakan dana tanggap darurat, berapa pun jumlahnya. Dalam jangka menengah, pemerintah harus meninjau kembali berbagai aturan dan kebijakan yang berpotensi memberi peluang besar masuknya PMK dengan cara menerapkan kembali kebijakan maximum security. (*)

*) *Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP)*

Judul : Wabah Serang Sapi Lokal Hingga Lockdown, Gegara Daging Impor?

Penulis : Damiana Cut Emeria

Waktu : 11 Mei 2022

Sumber : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220511120450-4-338096/wabah-serang-sapi-lokal-hingga-lockdown-gegara-daging-impor>

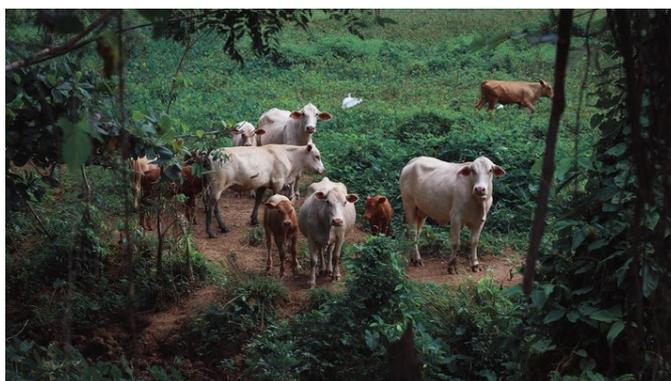


Foto: Ilustrasi Sapi (Liam Ortiz from Pixabay)

Jakarta, CNBC Indonesia - Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) saat ini tengah menyerang ternak sapi di 4 kabupaten di Jawa Timur dan 1 kabupaten di Aceh.

Padahal, menurut Kementerian Pertanian (Kementan), Indonesia tercatat bebas PMK sejak 1986 dan mendapatkan pengakuan internasional pada 1990.

Lalu, mengapa wabah ini bisa terjadi lagi di Indonesia? Apakah ada hubungannya dengan importasi daging kerbau beku asal India dan daging sapi beku asal Brasil? Dimana kedua negara ini belum dinyatakan bebas PMK, sementara pemerintah memang mengizinkan impor dari zona aman di negara belum dinyatakan bebas PMK.

Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan Bambang menegaskan, pihaknya melakukan pengawasan ketat atas semua lalu lintas di pintu pemasukan dan pengeluaran, termasuk impor. Dan, tidak ditemukan adanya kontaminasi pada media pembawa hingga saat ini.

"Seluruh media pembawa yang dilalulintaskan melalui pintu pemasukan dan pengeluaran dijaga ketat oleh Barantan dan diambil sampelnya untuk memastikan apa ada yang terkontaminasi atau tidak. Dan sampai saat ini tidak ada yang ditemukan terkontaminasi virus PMK," kata Bambang kepada CNBC Indonesia, Rabu (11/5/2022).

Sementara itu, Ketua Jaringan Pemotongan dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI) Asnawi mengatakan, PMK merupakan penyakit dengan penularan tinggi. Baik melalui air liur, feses, rambut, hingga transmisi lewat udara dengan radius hingga 200 kilometer.

Karena itu, dia menambahkan, keputusan pemerintah segera melakukan pencegahan dengan menutup arus keluar masuk ternak dari daerah terjangkit PMK sudah tepat.

"Pengawasan pemerintah saat ini ekstra hati-hati. Kami melihat keseriusan pemerintah yang tanpa henti menangani hewan terjangkit di dua provinsi yang terjangkit dengan target 14 hari. Mereka serius melakukan pengobatan dan vaksin. Dan ini sesuai Instruksi Presiden agar tidak ada hewan dari daerah yang kena wabah keluar sehingga menular ke daerah lain," kata Asnawi dalam dialog Profit CNBC Indonesia, Rabu (11/5/2022).



Mengenai sumber penularan, Asnawi mengatakan, adanya kekhawatiran wabah PMK masuk dari daging kerbau beku impor dari India atau dari daging beku impor dari Brasil.

Namun, lanjut dia, sebelum masuk ke Indonesia, baik daging maupun media pembawa melewati pemeriksaan ketat sesuai standar internasional.

"Jadi nggak perlu ditakuti karena sebelum disembelih dan diekspor ke Indonesia, sudah dilakukan pengawasn ketat. Mulai di kandang, rumah potong, hingga pemeriksaan setelah penyembelihan di daerah asal. Untuk memastikan tak ada kontaminasi. Dan, tim Indonesia juga sudah menerapkan syarat halal, BPOM, hingga standar kesehatan veteriner," jelasnya.

"Saat pengulitan, posisi kaki kerbau juga digantung untuk memaksimalkan penirisan darah yang jadi sumber bakteri. Setelah itu, sebelum deboning, daging dilayukan 3-5 jam, bahkan 7 jam. Lalu sebelum dikemas untuk ekspor, juga diperiksa untuk mendapat stempel layak ekspor. Jadi, sangat kecil kemungkinan terjadi karena sangat steril," Asnawi menambahkan.

Karena itu, imbuh dia, daging impor baik kerbau maupun sapi dari India atau Brasil sudah aman melalui pemeriksaan ketat.

"Seperti kata Direktur Utama Bulog, jangan khawatir mengkonsumsi daging kerbau impor India," ujar Asnawi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengintruksikan Menteri Pertanian segera melakukan penguncian wilayah atau lockdown zonasi. Untuk menutup pergerakan ternak dari daerah terjangkit wabah PMK. Jokowi juga memerintahkan pengawasan ketat bekerja sama dengan kepolisian.

Saat ini, sudah dilakukan penguncian di 5 kabupaten.

Kelima kabupaten itu adalah Aceh Tamiang di Aceh, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No 404/KPTS/PK.300/M/O5/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, tertanggal 9 Mei 2022.

Lalu, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, dan Lamongan di Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No 403/KPTS/PK.300/M/O5/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, tertanggal 9 Mei 2022.

Judul : Populasi Ternak Terkonfirmasi PMK Meningkat, Pemotongan Hewan Diawasi Ketat

Penulis : Runik Sri Astuti

Waktu : 12 Mei 2022

Sumber : <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/05/12/populasi-ternak-terkonfirmasi-pmk-meningkat-pemotongan-hewan-diawasi-ketat>

Penanganan wabah penyakit mulut dan kuku di Sidoarjo, Jawa Timur, diintensifkan menyusul bertambahnya populasi ternak yang terkonfirmasi meluasnya sebaran virus. Selain lalu lintas ternak, tempat pemotongan juga diawasi.



Kompas/Runik Sri Astuti

Peternak menyuntikkan vitamin B kompleks pada sapi peliharaannya di Desa Gagang Kepuhsari, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jatim, Selasa (10/5/2022). Upaya itu untuk memperkuat kesehatan hewan ternak agar tak terjangkau penyakit mulut dan kuku (PMK).

SIDOARJO, KOMPAS — Penanganan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Sidoarjo, Jawa Timur, diintensifkan menyusul bertambahnya jumlah populasi ternak yang terkonfirmasi dan sebaran virus yang semakin meluas. Selain lalu lintas ternak, tempat pemotongan hewan juga diawasi ketat karena potensial menjadi sumber penularan.

Berdasarkan data Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, sampai dengan Rabu (11/5/2022), jumlah ternak yang berada dalam pengawasan sebanyak 1.098 ekor. Dari jumlah tersebut, yang terkonfirmasi PMK sebanyak 715 ekor.

Dari populasi ternak yang sakit, jumlah yang sembuh 170 ekor, mati 16 ekor, dan dipotong paksa 28 ekor. Adapun jenis ternak yang dilaporkan terserang PMK di Sidoarjo adalah sapi perah, sapi pedaging, dan kerbau.

Ratusan ternak yang terkonfirmasi PMK tersebut tersebar di 15 kecamatan dari total 18 kecamatan di Sidoarjo. Sebaran wabah penyakit ini semakin meluas dibandingkan pada 8 Mei 2022 yang baru menyentuh 13 kecamatan. Sebaran penyakit ini masih berpotensi meluas lagi karena sifat virusnya yang menyebar dengan sangat cepat dan memiliki banyak media pembawa.

Sidoarjo ditetapkan sebagai daerah wabah PMK oleh Kementan. Total terdapat empat kabupaten di Jatim yang ditetapkan sebagai daerah wabah PMK, yakni Sidoarjo, Gresik, Lamongan, dan Mojokerto. Di luar Jatim, Kementan menetapkan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai daerah wabah PMK.



Kompas/Runik Sri Astuti

Peternak menyemprotkan cairan disinfektan pada sapi peliharaannya di Desa Gagang Kepuhsari, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jatim, Selasa (10/5/2022). Upaya itu untuk mencegah sebaran virus agar tak terjangkau PMK yang tengah mewabah.

Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Tony Hartono merespons merebaknya wabah PMK yang menyerang ternak di wilayahnya. Pihaknya telah menurunkan tim medis untuk memeriksa kondisi seluruh hewan. Selain itu, pihaknya juga mengobati ternak yang sakit dengan memberikan obat antibiotik dan vitamin.

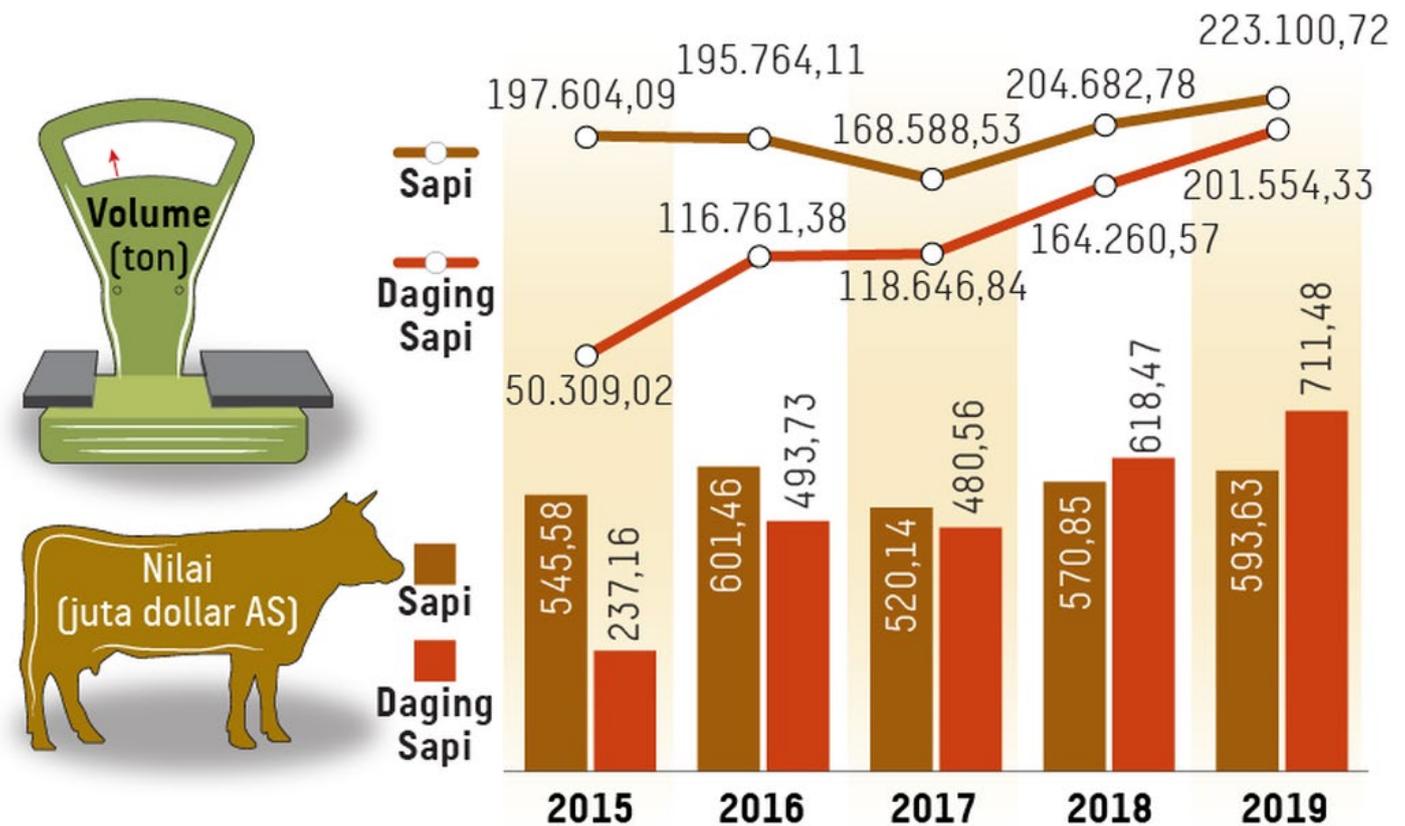
”Tim medis terus mengedukasi peternak agar meningkatkan kebersihan kandang dan rutin menyemprotkan cairan disinfektan untuk membunuh virus di lingkungan sekitarnya,” ujar Tony, Kamis (12/5/2022).

Tidak hanya itu, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo telah menjalin kerja sama dengan Polresta Sidoarjo dan Kodim 0816 Sidoarjo. Kerja sama lintas instansi ini difokuskan pada pengawasan kebijakan isolasi atau karantina kandang bagi ternak yang terkonfirmasi positif PMK. Hal itu untuk mencegah penularan.

Selain itu, polisi dan TNI dilibatkan dalam pengawasan lalu lintas ternak yang masuk dan ke luar dari Sidoarjo. Sebagai daerah penyangga Kota Surabaya, ternak yang dipotong dan dipasarkan di Sidoarjo berasal dari sejumlah daerah di sekitarnya, seperti Mojokerto, Pasuruan, dan Gresik.

Kepala Polresta Sidoarjo Komisaris Besar Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, pihaknya juga mengawasi aktivitas pemotongan hewan ternak terutama yang dilakukan secara ilegal. Pengawasan ini sangat penting karena pemotongan ternak di luar rumah potong hewan (RPH) yang resmi berpotensi menjadi sumber penularan PMK.

Impor Sapi dan Daging Sapi



Sumber: Kementerian Pertanian

INFOGRAFIK: ARJENDRO

”Aparat kepolisian bersama TNI dan dinas terkait akan berupaya maksimal dalam penanganan wabah PMK. Pengawasan terhadap tempat pemotongan hewan diperketat dan yang ilegal langsung ditutup,” kata Kusumo.

Semenjak penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak berkuku belah menjadi wabah di Sidoarjo, seluruh aktivitas perdagangan ternak dihentikan. Semua pasar hewan baik berskala besar maupun kecil ditutup total. Pasar hewan ini menjadi salah satu sumber penularan PMK di Jatim.

Tony menambahkan, pihaknya telah mengeluarkan imbauan kepada peternak yang ternaknya terserang PMK agar segera melapor ke posko. Selain itu, apabila ada ternak yang terpaksa harus dipotong karena sakit, pemotongan diminta dilakukan di RPH agar limbahnya terkelola dengan baik dan tidak menjadi media penularan virus.

Jika harus membawa ke RPH, peternak keberatan. Sebab, sapi yang sakit harganya jatuh.

Menanggapi imbauan tersebut, peternak sapi mengaku keberatan dan sulit mengimplementasikannya. Mustofa (51), peternak sapi di Desa Gagang Kepuhsari, Kecamatan Balongbendo, mengatakan, sapi yang sakit kondisinya ambruk sehingga sulit dibawa ke RPH. Biaya akomodasinya juga mahal.

”Jika harus membawa ke RPH, peternak keberatan. Sebab, sapi yang sakit harganya jatuh. Sebagai contoh, sapi seharga Rp 35 juta per ekor hanya dihargai Rp 6 juta bahkan Rp 3 juta,” ujar Mustofa.



Kompas/Runik Sri Astuti

Peternak memberi makan sapi peliharaannya di Desa Gagang Kepuhsari, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jatim, Selasa (10/5/2022). Asupan makanan penting untuk jaga daya tahan ternak. Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang terjangkau PMK.

Sementara itu, menyikapi merebaknya PMK yang menyerang hewan ternak berkuku belah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menyusun sejumlah upaya antisipasi meski belum ada kasus konfirmasi. Salah satunya menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada peternak, pengusaha sapi, koperasi susu, pedagang daging, dan pihak yang terkait lainnya.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf mengatakan, surat edaran itu berisi panduan bagi pihak-pihak terkait dalam menangani penyakit mulut dan kuku pada ternak. Pihaknya juga sudah meminta kepala desa dan camat mengawasi lalu lintas ternak di daerah masing-masing. Pengawasan di kandang ternak dilakukan oleh tim dokter hewan.

”Populasi sapi di Pasuruan luar biasa jumlahnya. Oleh karena itu, antisipasi penyakit mulut dan kuku harus dilakukan dengan baik,” ujar Irsyad.

Judul : Wabah PMK Jangan Dibiarkan Meluas

Penulis : Aditya Putra Perdana

Waktu : 13 Mei 2022

Sumber : <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/05/13/wabah-pmk-jangan-dibiarkan-meluas/>

Kementerian Pertanian mengumumkan ada enam kabupaten di Jatim dan Aceh yang terdapat hewan terkonfirmasi positif PMK. Namun, kenyataan di lapangan, ditemukan juga kasus positif di sejumlah kabupaten lain.



Kompas/Agus Susanto

Pemeriksa kesehatan hewan dari Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) memeriksa sapi di peternakan milik Pak Jaelani atau Pak Eeng di Jalan Pulokambing II, Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (12/5/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, yang awalnya hanya ditemukan di Provinsi Jawa Timur dan Aceh, kini sudah ditemukan di daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pemerintah diminta bertindak cepat, termasuk dengan pemusnahan sekaligus memberi penggantian kepada peternak.

Kementerian Pertanian mengumumkan ada enam kabupaten di Jatim dan Aceh yang terdapat hewan terkonfirmasi positif PMK. Namun, kenyataan di lapangan, ditemukan juga kasus-kasus positif di sejumlah kabupaten lain, baik di Jatim maupun daerah lain. Di Jateng, misalnya, hewan terjangkit PMK ditemukan di Kabupaten Boyolali.

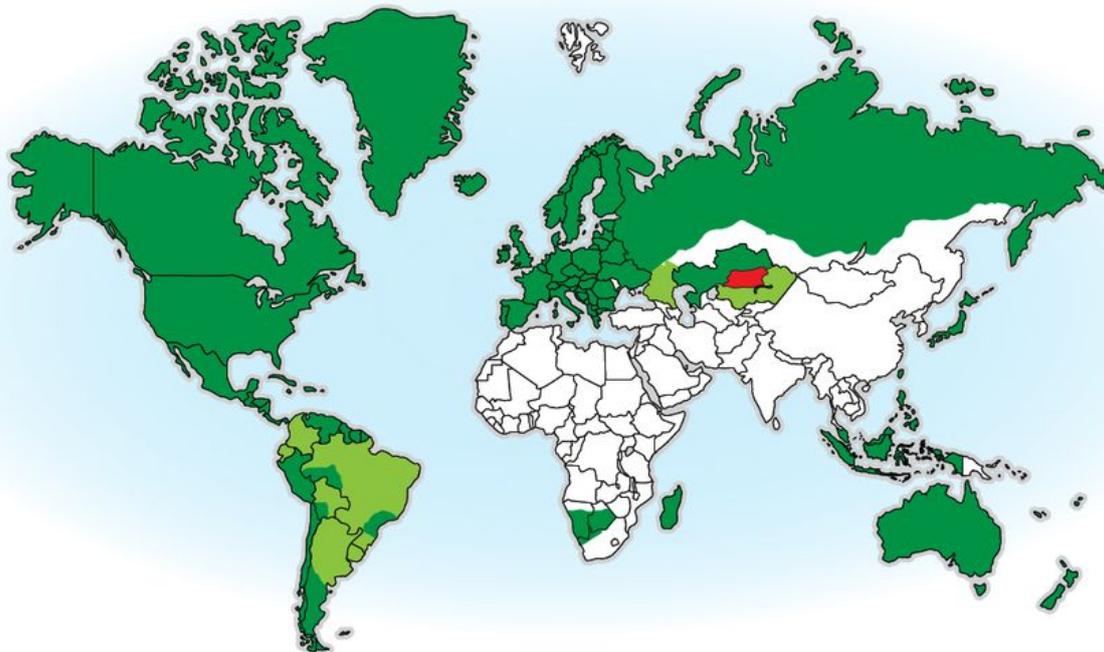
Dikutip dari situs Pemprov Jabar, Kamis (12/5/2022), Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar M Arifin Soedjayana menuturkan, temuan kasus positif PMK salah satunya di Garut, yakni 25 sapi potong, 3 sapi perah, dan 5 domba. Sementara di Tasikmalaya ada 18 sampel sapi positif dan di Kota Banjar sebanyak 11 sapi positif.

Dosen Fakultas Peternakan IPB University Epi Taufik, saat dihubungi, Kamis, mengatakan, cepatnya penularan PMK karena juga bisa menular lewat udara (airborne) sehingga perlu benar-benar diantisipasi. Sebelum semakin meluas, menurut dia, cara paling efektif ialah dengan dimusnahkan dan pemerintah mengganti kerugian peternak.

Peta Status Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Anggota Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE)

Data Januari 2022

- Anggota dan zona yang diakui bebas dari PMK tanpa vaksinasi
- Anggota dan zona yang diakui bebas dari PMK dengan vaksinasi
- Negara dan zona bukan anggota serta berstatus PMK
- Penangguhan status bebas PMK



- Penyakit mulut dan kuku pernah ada di Indonesia. Masuk ke Indonesia pada saat ada importasi sapi perah zaman Hindia Belanda tahun 1887.
- Penyakit ini berhasil diberantas dengan vaksinasi massal menggunakan vaksin yang diperoleh Lembaga Virologi Kehewan (LVK) yang kemudian berubah nama menjadi PUSVETMA.
- Indonesia dinyatakan bebas PMK pada 1986 dan kemudian diakui oleh OIE pada 1990.

Sumber: Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI



INFOGRAFIK: HANS

”Sebelum semakin banyak, lebih baik segera dimusnahkan. Idealnya seperti itu. Sementara yang sudah terlihat tanda-tanda, langsung potong darurat karena selama ditangani sesuai prosedur seperti dagingnya dilayukan hingga PH (derajat keasaman) turun, virus mati. Daging tetap aman dikonsumsi, apalagi dimasak, direbus atau digoreng,” ujar Epi.

Ia juga mengingatkan, walaupun tidak dimusnahkan, pemeriksaan harus dilakukan dengan ketat kepada seluruh hewan ternak. Namun, cara tersebut memakan waktu sehingga berisiko penyebaran justru keburu semakin meluas. ”Harus benar-benar dicek dan diperhatikan betul, apalagi menjelang Idul Adha. Surveilans harus dilakukan,” ujar Epi.

Setidaknya hingga Rabu (11/5/2022), berdasarkan data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, di Jatim terdapat 3.205 hewan yang positif PMK dengan tingkat kematian 1,5 persen. Sementara di Aceh Tamiang, pada Kamis (12/5/2022), dilaporkan sudah ada 2.555 sapi positif PMK dan 13 di antaranya mati.

Dirjen PKH Kementerian Pertanian Nasrullah menuturkan, hewan ternak yang tertular PMK hanya yang berkuku terbelah, yakni sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi, tidak termasuk kuda. Pihaknya telah membuat petunjuk teknis dan disampaikan ke daerah-daerah, termasuk terkait penutupan zona wabah atau pembatasan, pengendalian hingga pemusnahan.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa serotipe dari kasus PMK yang merebak saat ini ialah O dengan strain Ind2001. Selain pengobatan, pemerintah pun kini tengah menyiapkan vaksin buatan dalam negeri. Sambil menunggu itu, pemerintah rencananya akan mengimpor vaksin untuk diberikan terutama pada hewan-hewan yang positif PMK.

Terkait Idul Adha, Kementan mengupayakan pasokan daging kurban tetap tersedia dengan kesehatan dan keamanan yang terjamin. "Saat Idul Adha biasanya yang dipakai 10-20 persen dari total populasi. Kami akan buat SOP khusus, seperti memobilisasi hewan dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa terkontaminasi. Ini kami bahas terus sehingga saat Idul Adha tersedia hewan kurban yang sehat dan aman," ujar Nasrullah.



Kompas/Agus Susanto

Petugas dari Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) menyemprotkan disinfektan di peternakan milik Pak Jaelani atau Pak Eeng di Jalan Pulokambing II, Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (12/5/2022).

Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Ali Usman mengemukakan, wabah PMK yang merebak ini tidak bisa dianggap sepele. Ini juga menjadi pelajaran berharga bahwa setiap kebijakan yang diambil haruslah dipertimbangkan berbagai risikonya. Selain itu, mitigasi dan pengawasan juga harus dilakukan dengan prosedur ketat.

"Sejak 1990 Indonesia diakui internasional sebagai negara bebas PMK, tetapi lalu mengambil risiko dengan kebijakan impor berbasis zona, bukan negara. Padahal, untuk menjadi negara bebas PMK, perjuangannya selama 100 tahun. Saat ini, yang utama bagaimana secepat mungkin PMK ini bisa diselesaikan hingga tuntas," ucap Ali.

Judul : 5 Fakta Penyakit Kuku dan Mulut yang Sedang Mewabah di Indonesia

Penulis : CNN Indonesia

Waktu : 14 Mei 2022

Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220514080653-255-796669/5-fakta-penyakit-kuku-dan-mulut-yang-sedang-mewabah-di-indonesia>



Penyakit mulut dan kuku menyerang hewan. (Foto: CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyakit mulut dan kuku (PMK) kini tengah mewabah di Indonesia. Penyakit ini memang tidak menyerang manusia, tetapi menyerang ribuan hewan ternak di sejumlah wilayah Indonesia.

Wabah PMK ini sebenarnya bukan hal yang baru dan kerap muncul di berbagai negara. Tidak sedikit negara yang menganggap wabah ini sebagai hal yang biasa. Berikut fakta-fakta wabah PMK yang saat ini tengah mewabah di Indonesia.

1. Bukan pertama kali

Wabah PMK di Indonesia telah terjadi sejak dua abad lalu, tepatnya pada 1887 silam. Kala itu wabah PMK disebut muncul melalui sapi yang diimpor dari Belanda.

Setelah 1887 masuk, Indonesia beberapa kali menghadapi wabah ini. Wabah PMK terakhir yang dihadapi Indonesia terjadi pada 1983 yang berhasil diberantas melalui program vaksinasi. Dan pada 1986 Indonesia benar-benar dinyatakan sebagai negara bebas penyakit mulut dan kuku.

2. Menular ke berbagai jenis hewan ternak

PMK merupakan penyakit yang mudah menular antar hewan. Sejumlah hewan berkuku belah seperti sapi, babi, kambing serta beberapa hewan liar seperti jerapah dan gajah menjadi kelompok paling berisiko.

3. Terjadi karena virus

PMK disebabkan oleh virus kelompok Aphthovirus dari keluarga picornaviridae.

Terdapat beberapa serotipe PMK yang telah teridentifikasi di dunia. Penyebab wabah PMK di Indonesia pada 1983 hanya disebabkan oleh serotipe O.

4. Gejala umum

Ada sejumlah tanda klinis yang paling umum dialami hewan yang terjangkit PMK, seperti hewan terlihat lemah dan pincang, hipersaliva atau produksi air liur berlebih, muncul lesi dan luka di dalam mulut, lidah, kulit kaki, dan puting.

Selain itu, hewan juga mengalami demam tinggi hingga 41 derajat Celcius, hewan terlihat lebih sering berbaring dan mengalami penurunan produksi susu yang cukup drastis pada sapi perah.

5. Dagingnya masih bisa dikonsumsi

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan sebagian daging ternak yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku (PMK) masih bisa dikonsumsi, kecuali bagian mulut, jeroan dan bibir seperti lidah yang memang tidak layak dimakan.

"Jeroan dan bagian mulut seperti bibir dan lidah ternak yang terkena PMK tidak bisa dikonsumsi. Tapi yang lain masih bisa direkomendasikan, dagingnya pun masih bisa dimakan," kata Syahril dalam konferensi pers virtual beberapa waktu lalu.

Judul : Yogyakarta Laporkan Dua Kasus PMK Pertama

Penulis : CNN Indonesia

Waktu : 16 Mei 2022

Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220516112224-20-797179/yogyakarta-laporkan-dua-kasus-pmk-pertama>



Ilustrasi. Dua hewan ternak di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, DIY dilaporkan terserang penyakit mulut dan kuku (PMK). (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melaporkan dua kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pertama. Kasus ditemukan pada hewan ternak di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo.

Kepala Dinas Pertanian DIY Sugeng Purwanto mengatakan, dua kasus pertama ini ditemukan pada seekor sapi dan kambing milik peternak setempat. Keduanya sempat berstatus suspek atau terindikasi akut semenjak menunjukkan gejala terinfeksi PMK beberapa hari lalu.

"Kemarin terinfo seperti itu [suspek]. Cuma dalam bentuk kehati-hatian, kita sudah lakukan beberapa antisipasi, langkah konkrit. Tapi, mungkin perkembangan lebih lanjut bisa dikatakan yang dua ekor itu sudah terkena (PMK)," kata Sugeng saat dihubungi, Senin (16/5).

Temuan ini, menurutnya, langsung dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersama kepolisian. Sugeng memastikan, kedua hewan ternak itu kini telah diisolasi atau dikarantina oleh satuan tugas (satgas) khusus antisipasi PMK terkait setempat.

Satgas turut mengamati gejala PMK yang dialami dua hewan tersebut. Termasuk juga melakukan disinfeksi pada kandang tempat sapi dan kambing itu sebelumnya tinggal.

"Yang pasti itu [asal hewan ternak] dari masyarakat sendiri sementara. Cuma keberadaannya kapan di situ dan sebagainya ini masih coba kami konfirmasi terus," bebernya.

Sugeng mengklaim, sejauh ini temuan kasus PMK di wilayah DIY baru ditemukan di Kulon Progo. Kabupaten/kota lainnya masih nihil laporan.

Demi mengantisipasi penyebaran PMK lebih luas lagi, pihaknya bersama kepolisian atau instansi vertikal terkait dan jajaran kabupaten/kota akan terus mengawasi lalu lintas pengiriman hewan ternak.



Ilustrasi. Dua kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pertama di DIY terjadi di Kabupaten Kulon Progo. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

Langkah ini, menurut Sugeng, masih akan menjadi fokus utama jajarannya. Apalagi mengingat kebutuhan konsumsi daging wilayah DIY, sekitar 50 persen di antaranya dipenuhi dari daerah lain.

Kendaraan pengangkut hewan ternak dari daerah merah atau hitam penyebaran PMK bakal langsung diminta putar balik oleh petugas pos pengecekan. Sedangkan mereka yang tiba dari daerah hijau tetap akan menjalani pemeriksaan.

Sugeng menyebut, pihaknya bersama instansi lainnya di lingkungan Pemda DIY tengah memproses surat edaran (SE) Gubernur terkait dengan kewaspadaan terhadap virus PMK pada hewan ternak.

Tim satgas khusus antisipasi PMK, lanjut Sugeng, akan memantau langsung ke pasar-pasar hewan sebagai langkah pencegahan kemungkinan kecolongan di pintu masuk lalu lintas ternak.

"Tetap kita masih menjaga kondusivitas. Kami pun tidak kemudian panik dan lain sebagainya, kami tetap waspada," pungkasnya.



Judul : 1.247 Hewan Ternak di Jatim Terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku

Penulis : CNN Indonesia

Waktu : 7 Mei 2022

Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220507121328-20-793840/1247-hewan-ternak-di-jatim-terjangkit-penyakit-mulut-dan-kuku>



Ilustrasi. Ribuan sapi, kerbau, kambing di Jawa Timur terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku (ANTARA FOTO/Sahlan Kurniawan/Rei/Spt/14.)

Surabaya, CNN Indonesia -- Sebanyak 1.247 ekor hewan ternak di Jawa Timur terjangkit wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Wabah itu menyebar di empat kabupaten di Jatim yaitu Kabupaten Lamongan, Mojokerto, Gresik dan Sidoarjo.

"Outbreak telah menyerang 1.247 ekor di empat kabupaten tersebut yang terkonfirmasi memiliki tanda klinis sesuai dengan indikasi penyakit PMK," kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Grahadi, Surabaya, Sabtu (7/5).

Tanda klinis penyakit tersebut berupa demam tinggi 39-41 derajat celsius, keluar lendir berlebihan dari mulut dan berbusa.

Kemudian luka-luka seperti sariawan pada rongga mulut dan lidah, tidak mau makan, kaki pincang, luka pada kaki dan diakhiri kuku lepas, sulit berdiri, gemetar, napas cepat, produksi susu turun drastis dan menjadi kurus.

"Namun, penyakit ini tidak menular ke manusia, melainkan menular ke sesama hewan," ujar Khofifah.

Khofifah mengatakan **kasus pertama** dilaporkan terjadi di Kabupaten Gresik pada 28 April 2022 dengan jumlah kasus 402 ekor sapi potong terjangkit PMK dan tersebar di 5 kecamatan dan 22 desa.

Kasus kedua dilaporkan pada 1 Mei 2022 di Kabupaten Lamongan. Sebanyak 102 ekor sapi potong yang terindikasi mengalami PMK dan tersebar di 3 kecamatan dan 6 desa.

"**Di hari yang sama**, Kabupaten Sidoarjo juga ditemukan kasus yang menjangkit sebanyak 595 ekor sapi potong, sapi perah dan kerbau. Kasus itu ditemukan dengan sebaran di 11 kecamatan dan 14 desa," ucapnya.

Lalu **kasus keempat** dilaporkan 3 Mei 2022 di Kabupaten Mojokerto. Kasus yang dilaporkan berupa 148 ekor sapi potong yang tersebar di 9 kecamatan dan 19 desa.

"Dari laporan masyarakat serta hasil peninjauan di lapangan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jatim dan uji lab Pusvetma, pada 5 Mei resmi terkonfirmasi ada empat kabupaten di Jatim yang hewan ternaknya terjangkit PMK," kata dia.

Berdasarkan penjelasan Dirjen PKH Kementan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Khofifah menyebut wabah yang menyerang ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, kuda dan babi itu memiliki tingkat penularan mencapai 90-100 persen.

Sejauh ini Khofifah sudah menggelar rapat intensif dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) para direktur, tim Kemenko Perekonomian, dan empat Bupati yang terjangkit wabah, serta kalangan akademisi FKH UNAIR serta institusi lain.

"Rakor khusus digelar guna merumuskan langkah komprehensif penghentian penularan PMK pada hewan ternak agar tidak meluas ke daerah lain," kata khofifah.

Judul : Belajar dari Negara Lain dalam Mengendalikan Penyakit Mulut dan Kuku

Penulis : Pradipta Pandu Mustika

Waktu : 16 Mei 2022

Sumber : <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/05/16/kendalikan-pmk-pembatasan-pergerakan-hewan-ternak-dari-negara-lain-dapat-dicontoh>

Upaya pembatasan pergerakan hewan ternak untuk mengendalikan PMK dapat melihat contoh dari negara lain. Selama pembatasan, polisi dan petugas berwenang untuk menghentikan kendaraan yang dicurigai membawa hewan ternak.



Kompas/Agus Susanto

Pemeriksa kesehatan hewan dari Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Timur memeriksa sapi di peternakan milik Pak Jaelani atau Pak Eeng di Jalan Pulokambing II, Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (12/5/2022). Pemeriksaan fisik hewan ternak dilakukan untuk pencegahan merebaknya penyakit mulut dan kuku.

JAKARTA, KOMPAS – Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang mewabah di Indonesia perlu dikendalikan melalui pembatasan pergerakan hewan ternak, pemusnahan, penelusuran, dan penetapan zona proteksi. Pembatasan pergerakan hewan ternak dapat mencontoh negara lain seperti Selandia Baru dan Australia.

Ketua II Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) Tri Satya Putri Naipospos mengemukakan, penyakit mulut dan kuku (PMK) merupakan penyakit paling menular pada hewan yang pernah diketahui dunia. Tercatat lebih dari 100 negara telah terserang wabah ini dan 77 persen populasi ternak dunia masih tertular.

”PMK yang menyerang di negara berpendapatan rendah dan menengah akan menjadi ancaman utama terhadap suplai dan ketahanan pangan. Bahkan, wabah PMK di Inggris pada 2001 mengakibatkan kerugian sangat besar sekitar 3,1 miliar pound sterling,” ujarnya dalam diskusi daring tentang kesiapsiagaan dan respons darurat wabah PMK, di Jakarta, Minggu (15/5/2022) malam.

Studi yang dilakukan pada tahun 2017 menunjukkan, risiko masuknya virus PMK ke Asia Tenggara cukup tinggi. Realitas ini dipicu oleh deteksi virus PMK serotipe O dari Asia Selatan ke Laos, Vietnam, dan Myanmar pada tahun 2015 serta Asia-1 ke Myanmar pada 2017.

PMK yang menyerang di negara berpendapatan rendah dan menengah akan menjadi ancaman utama terhadap suplai dan ketahanan pangan.

Sementara berdasarkan penilaian dari Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (OIE) pada 2017, risiko penyebaran PMK di Indonesia masuk dalam kategori sedang dengan tingkat perdagangan ekstensif. Saat itu, Indonesia masih dikategorikan bebas PMK. Adapun mutu sistem kesehatan hewan nasional (siskeswannas) Indonesia menghadapi penyakit ini tergolong buruk.



Kompas/Bahana Patria Gupta

Winarto menyemprotkan cairan ke kuku sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku di Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Rabu (11/5/2022).

Menurut Tri, prinsip pengendalian wabah PMK ialah mencegah penularan virus dari ternak yang terinfeksi ke ternak yang rentan. Prinsip ini dilakukan dengan cara menghilangkan produksi virus, mengurangi potensi kontak langsung antara ternak, mengurangi lama waktu bertahan di lingkungan, dan mengurangi jumlah hewan yang rentan.

Dalam aturan internasional, lanjut Tri, tindakan pengendalian awal wabah PMK yang perlu dilakukan ialah menerapkan pembatasan pergerakan ternak (standstill). Beberapa negara yang terserang wabah PMK juga membatasi pergerakan ternak ini.

Sebagai contoh, Selandia Baru melarang semua pergerakan hewan ternak, yakni babi, sapi, domba, kambing, dan kerbau, jika wabah PMK terjadi. Semua pihak yang terlibat dalam rantai suplai ternak juga diminta memahami pergerakan hewan ternak ini, meliputi pemilik ternak, transporter, agen produksi, pekerja rumah potong hewan, dan pasar hewan.

Sementara di Australia, pemerintah memberlakukan national livestock standstill ketika secara nasional disetujui spesies ternak tertentu yang terkena dampak penyakit darurat ini. Pembatasan pergerakan ternak awalnya diterapkan selama 72 jam, tetapi bergantung pada penilaian risiko selanjutnya. Selama pembatasan, polisi dan petugas berwenang menghentikan kendaraan yang dicurigai membawa hewan ternak.

”Jika melihat situasi saat ini, tindakan pengendalian awal wabah PMK di Indonesia sedikit kacau. Pihak Pemerintah Indonesia memang sudah banyak menyampaikan pembatasan pergerakan ternak, tetapi banyak yang tidak mampu melakukannya karena kita tak mempunyai landasan undang-undang,” ungkap Tri.

Selain itu, tindakan lain yang dapat dilakukan ialah pemusnahan menyeluruh (stamping-out) pada peternakan tertular. Strategi ini diakui dan terbukti dapat menghilangkan dengan cepat penyakit eksotis atau penyakit ternak darurat lainnya.

Elemen penting tindakan ini di antaranya penetapan zona terinfeksi, penerapan karantina, penyembelihan langsung, disposal yang aman, dan disinfeksi atau pembersihan.

Upaya penanganan

Sebelumnya, dalam keterangan pers, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpomemastikan penanganan penyakit mulut dan kuku terus dilakukan secara optimal. Upaya yang dilakukan di antaranya dengan mendistribusikan obat, penyuntikan vitamin, pemberian antibiotik dan penguatan imun, dan melakukan riset serta uji laboratorium guna menemukan vaksin dalam negeri.

”Kami membentuk satuan dan gugus tugas, kemudian agenda darurat, langkah temporer, dan agenda pemulihan. Kita telah menemukan stereotipe untuk membuat vaksin dalam waktu singkat. Minimal dalam 14 hari ini kita ada vaksin dari luar negeri yang selanjutnya akan kita produksi sendiri di Pusvetma, Surabaya,” katanya.

Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan IPB University Sri Murtini menjelaskan, penularan PMK bisa terjadi melalui kontak langsung ataupun udara. Oleh karena itu, penanganan yang cepat dan tepat sangat diperlukan guna memutus rantai penularan.

Murtini menambahkan, penanganan dan pengendalian wabah ini butuh dukungan semua pihak, termasuk pemilik peternakan hewan. Para peternak diminta senantiasa memperhatikan kebersihan kandang dan melakukan disinfeksi secara berkala untuk mencegah pertumbuhan virus dan bakteri di area kandang.

Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak

Definisi

Penyakit mulut dan kuku (PMK) adalah penyakit hewan menular bersifat akut yang disebabkan oleh virus tipe A dari keluarga *Picornaviridae*, genus *Aphthovirus*. Masa inkubasi virus ini 2-14 hari dengan menyerang hewan berkuku belah (*cloven hoof*), seperti sapi, kerbau, domba, kambing, babi, rusa/kijang, unta, dan gajah.

Penularan

Penularan secara langsung dapat melalui droplet, leleran cairan hidung, dan serpihan kulit pada hewan yang terinfeksi. Penularan secara tidak langsung terjadi pada vektor hidup, yaitu manusia dan hewan lainnya. Virus ini dapat menyebar melalui angin di daerah beriklim khusus, bisa mencapai radius 60 km di darat dan 300 km di laut.

Gejala klinis

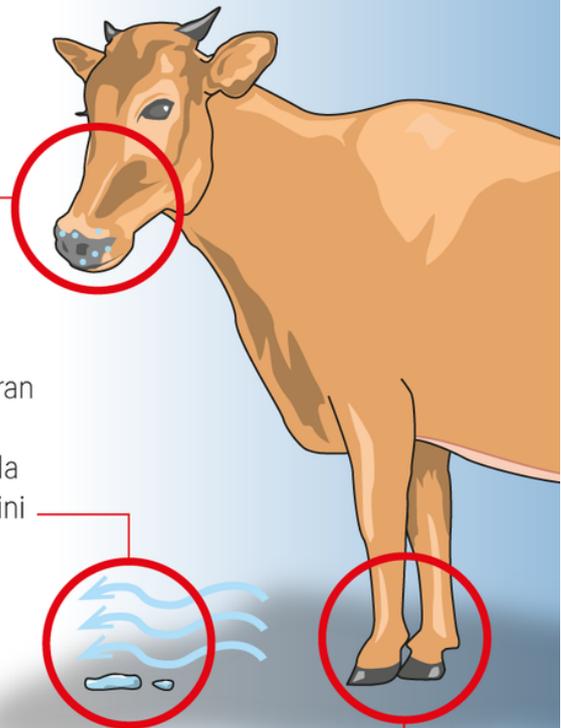
Demam mencapai 39°C selama beberapa hari. Pada sejumlah hewan, seperti domba, kambing, dan rusa, lesi-lesi berupa lepuh-lepuh kecil dan sulit dilihat sehingga diperlukan pengamatan yang teliti. Pada beberapa kasus, gejala PMK dapat dikelirukan dengan penyakit busuk kuku atau *foot rot*.

Dampak

Pada hewan ternak yang tertular, penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, virus PMK sangat jarang tertular ke manusia. Namun, perdebatan para pakar masih terjadi terkait hal ini karena ada beberapa kasus penularan ke manusia melalui konsumsi hasil hewan ternak (susu sapi).

Penyebaran saat ini

Sejauh ini, Kementerian Pertanian telah menetapkan Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur di **Aceh**, serta Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto di **Jawa Timur** sebagai daerah wabah PMK.



Judul : Sampel Penyakit Mulut dan Kuku Akan Dikirim ke Laboratorium di Luar Negeri

Penulis : Zacharias Wuragil

Waktu : 20 Mei 2022

Sumber : <https://tekno.tempo.co/read/1593568/sampel-penyakit-mulut-dan-kuku-akan-dikirim-ke-laboratorium-di-luar-negeri>



Petugas kesehatan memeriksa kesehatan mulut sapi di peternakan sapi CV Puput Bersaudara di Depok, Jumat 20 Mei 2022. Di peternakan ini untuk sementara diberlakukan "lockdown" untuk berfokus pada perawatan kesehatan bagi ratusan sapiunya guna melindungi dari penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku yang saat ini sedang marak. TEMPO/ Gunawan Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan segera mengirim sampel **penyakit mulut dan kuku** yang sedang menyerang dan merebak di antara ternak yang ada saat ini ke laboratorium rujukan milik Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (OIE). Pengiriman sampel ke laboratorium ini berguna untuk konfirmasi jenis virus dan memilih vaksin yang tepat untuk digunakan hingga penanganan penyebaran virusnya bisa lebih cepat.

Langkah tersebut terungkap dalam *webinar Talk to Scientist* yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN pada Kamis 19 Mei 2022. Pengiriman sampel oleh Pusat Veteriner Farma, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, merespons tawaran yang diberikan Donald King yang adalah Kepala Laboratorium Rujukan Penyakit Mulut dan Kuku di FAO dan OIE di Institut Pirbright, Inggris.

Dia mengingatkan kepada otoritas kesehatan ternak dan juga para peneliti di Indonesia akan keberadaan laboratorium di negara lain, termasuk milik FAO dan OIE, yang siap membantu dan membimbing upaya pengendalian penyakit mulut dan kuku. "Pintu terbuka, beri tahu apa yang bisa kami bantu," kata King.

Tawaran langsung direspons peserta webinar dari Pusat Veteriner Farma Kementerian Pertanian yang menyatakan sudah menyiapkan sampel untuk dikirim ke Pirbright. Kepala Pusat Riset Veteriner BRIN, Harimurti Nuradji, pembicara sekaligus moderator *webinar*, juga termasuk yang antusias dan menyebut tawaran sangat berharga.

"Kami akan mengambil tawaran Anda terkait dukungan laboratorium serta prosedur standar untuk deteksi dan diagnosis. Semua itu sangat membantu kami," katanya.

Latar belakang bantuan ditawarkan ke Indonesia

Dalam *webinar*, King menekankan pentingnya konfirmasi cepat atas kasus-kasus dugaan penyakit ini di lapangan karena penularannya yang juga sangat cepat. Diagnosa melalui gejala klinis harus didukung dengan penggunaan berbagai teknologi virologi untuk menentukan jenis virus dan asal usulnya.

"Semakin Anda terlambat mendeteksinya semakin tinggi biaya dan semakin luas wilayah yang terdampak sehingga membuat semakin berat pengendaliannya," katanya.

Teknologi diagnosa yang menjadi standar internasional dalam penanganan penyakit mulut dan kuku adalah isolasi virus, Ag ELISA, dan *real time* PCR. Yang pertama disebut sensitif namun lama dan masih butuh konfirmasi. Yang kedua cepat tapi tidak memiliki sensitivitas tinggi secara analitik.

Sedangkan RT-PCR menjadi metode tes yang cepat dengan sensitivitas analisis dan diagnosa yang tinggi. Metode ini juga bisa digunakan untuk segala sampel, apakah itu dari kulit, serum, darah utuh, swab maupun *probang*. Tapi, King memaparkan, tetap ada kehati-hatian perihal hasil tes positif atau negatif yang palsu.

Terangkai dengan penjelasannya itulah King membeberkan bagaimana laboratorium rujukan penyakit kuku dan mulut FAO/OIE bisa membantu Indonesia dalam menghadapi wabah yang sekarang. Ada tiga poin yang disampaikan yakni, pertama, dukungan teknis karakterisasi sampel dari lapangan. Dia mempersilakan jika pemerintah atau peneliti ingin melakukan tes lanjutan selain yang dilakukan di laboratorium dalam negeri.

Poin kedua adalah *vaccine matching*, yakni mencari antigenik vaksin yang sesuai dengan galur virus yang didapat dari lokasi. "Kami bisa membantu mengidentifikasi kandidat vaksin-vaksinnya yang bisa digunakan," kata King. Proses di sini tidak singkat karena kompleks, dan seperti diungkap Wilna Vosloo, pembicara dari CSIRO Health and Biosecurity, Australia, tak jarang harus mencoba banyak isolat virus untuk menemukan satu yang bisa digunakan untuk menghasilkan sebuah vaksin yang bagus.

Dukungan ketiga yang bisa diberikan adalah terkait pemantauan pascavaksinasi. Ini mencakup, antara lain, pengujian serum dari hewan yang sudah divaksin dan mengukur aneka respons terhadap risiko virus yang mewakili.

Seperti diketahui, penyakit mulut dan kuku kembali merebak di Indonesia. Pengumuman pertama dibuat di **Jawa Timur** pada awal bulan ini dan menyebut lebih dari 1200 hewan di 4 daerah telah terinfeksi. Pada pekan ini, Kementerian Pertanian mengklaim tren penyebaran penyakit mulai menurun dan 16 daerah yang terkontaminasi siap menghadapi Idul Adha.

Judul : PMK dan Pasar Daging Sapi

Penulis : Rochadi Tawaf

Waktu : 21 Mei 2022

Sumber : <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/05/20/pmk-dan-pasar-daging-sapi>

Wabah PMK berpotensi mengakibatkan kerugian nasional sangat besar. Ombudsman RI harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Perlu moratorium kebijakan impor daging dari negara-negara yang belum bebas PMK.



Didie SW

Indonesia sebagai negara yang mengonsumsi daging sapi sekitar 706.388 ton pada 2022 diprediksi hanya mampu memproduksi daging sekitar 436.704 ton.

Selama ini, permintaannya tumbuh sekitar 6,4 persen per tahun, jauh lebih tinggi daripada kemampuan produksinya yang hanya tumbuh 1,3 persen per tahun. Kekurangannya didatangkan melalui impor. Kondisi inilah yang menjadikan negeri ini pasar daging yang menggiurkan bagi negara-negara produsen daging sapi dunia.

India sebagai salah satu negara eksportir daging sapi dan kerbau terbesar di dunia sangat berkepentingan dengan besarnya pasar daging Indonesia. Namun, sayangnya, India hingga kini belum bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK). Keinginan para pedagang dari India untuk memasarkan daging ke Indonesia dimulai sejak Indonesia dinyatakan bebas dari PMK tanpa vaksinasi oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) pada tahun 1990.

Manuver membahayakan

Sejak itu, mulai marak daging selundupan yang berasal dari India melalui pintu masuk di perbatasan negara, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. India sebagai negara yang sebagian besar rakyatnya tidak memakan daging sapi memiliki keunggulan komparatif di mana harga daging relatif jauh lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Selisih harga yang cukup signifikan inilah yang menarik para pedagang untuk menguasai pangsa pasar daging di negeri ini. Berbagai upaya ditempuh oleh para pedagang yang ingin memasukkan dagingnya ke Indonesia. Manuver yang ditempuh, antara lain, adalah mengembuskan isu ke permukaan, terutama mengenai selisih harga, monopoli, harga daging mahal, sampai konsep perdagangan imbal beli.

Manuver ini mulai menampakkan hasilnya dengan munculnya opini mengenai monopoli impor daging sapi di Indonesia sekitar awal tahun 2000-an.

Berbagai upaya ditempuh oleh para pedagang yang ingin memasukkan dagingnya ke Indonesia.

Sejak opini ini muncul, mulailah manuver berikutnya, yakni untuk membuka proteksi maksimum sekuriti dalam rangka perlindungan dari serangan penyakit PMK, dengan mengubah Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), dari UU No 6 Tahun 1967 menjadi UU No 18 Tahun 2009. Dalam perubahan UU ini jelas-jelas pemerintah bersama DPR menghendaki proteksi terhadap penyakit di Indonesia, tak lagi berbasis negara, tetapi berbasis zona, dengan alasan Indonesia negara kepulauan.

Selain itu, mencuat isu dominasi perdagangan daging yang hanya berasal dari satu negara (monopoli), yang kesemuanya diramu menjadi seolah penyebab mahalannya harga daging adalah lantaran hal tersebut. Frasa ini telah ditentang oleh masyarakat peternak dan para tokoh senior dokter hewan, termasuk mantan dirjen PKH, yang sangat menyadari bahwa negeri ini tidak memiliki sarana untuk melindungi diri terhadap kemungkinan serangan penyakit hewan menular strategis, seperti PMK.

Silang pendapat pun terjadi pada saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) di DPR. Namun, sepertinya ada pemaksaan kehendak sehingga frasa tersebut tetap tercantum dalam perubahan UU PKH No 18 Tahun 2009. Silang pendapat ini pun berakhir dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusan Nomor 137/PUU-VII/2009 yang mengatur bahwa pemasukan ternak dan produk ternak tetap menganut basis negara, bukan wilayah (zona).



Namun, tak selang berapa lama, pada 2014, kembali terjadi perubahan terhadap UU No 18/2009 yang mencantumkan kembali frasa bahwa pemasukan ternak dan produk ternak adalah berbasis zona. Pada kasus yang kedua, dilakukan gugatan kembali ke MK oleh sebagian masyarakat peternak. Dari gugatan ini, keluar putusan MK No 129/PUU/XIII/2015 yang menyebutkan impor ternak dan produk ternak boleh dilakukan dari negara berbasis zona.

Produk hukum inilah yang menurunkan kebijakan operasional berupa Peraturan Pemerintah (PP) No 4 Tahun 2016, Peraturan Menteri No 17/Permentan/ PK.450/5/2016, dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No 2556/2016 yang membolehkan masuknya daging India.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat peternak melakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung (MA) atas diterbitkannya PP No 4 Tahun 2016. Pasalnya, India negara yang belum bebas PMK dan tak memiliki zona. Namun, lagi-lagi putusan MA No 27/P/HUM/ 2018 tetap memberlakukan PP No 4 Tahun 2014. Sejak kebijakan ini diundangkan, impor daging sapi asal India menjadi legal, yakni sejak Juni 2016.

Hal yang paling dikhawatirkan—dan memicu penolakan terhadap kebijakan impor daging dari negara-negara yang belum bebas PMK— telah menjadi kenyataan.

Moratorium impor

Semua, fenomena yang terjadi ini, merupakan jurus jungkir baliknya Presiden Jokowi untuk menurunkan harga daging sapi. Namun, faktanya, harga daging yang ditargetkan Rp 80.000 per kilogram tidak pernah menjadi kenyataan. Bahkan, di pasar konsumen, daging India ini naik harganya, sama dengan harga daging lokal.

Fakta yang sangat memprihatinkan adalah merebaknya wabah PMK di Jawa Timur saat ini. Hal yang paling dikhawatirkan—dan memicu penolakan terhadap kebijakan impor daging dari negara-negara yang belum bebas PMK— telah menjadi kenyataan.

PMK ini mengakibatkan kerugian nasional yang luar biasa besar, tak kurang dari Rp 15,5 triliun (Sudardjat, 2015), belum termasuk dampak kerugian di sektor ekonomi lain, seperti pariwisata, ekspor komoditas pertanian, penurunan populasi ternak, dan terdampaknya pangan yang berasal dari daging sapi.

Atas kejadian ini, Ombudsman RI harus melakukan evaluasi terhadap kecerobohan kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah. Selain itu, sebaiknya pemerintah melakukan moratorium terhadap kebijakan impor daging dari negara-negara yang belum bebas PMK serta melakukan rekonstruksi terhadap pembangunan peternakan dan kesehatan veteriner. Semoga.

Rochadi Tawaf Dewan Pakar PB Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI); Penasihat PP Perhimpunan Ilmuwan Sosial Ekonomi Peternakan Indonesia

Judul : Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak dalam Pandangan Pakar FPP UNDIP

Penulis : Humas Undip

Waktu : 23 Mei 2022

Sumber : <https://www.undip.ac.id/post/24488/penyakit-mulut-dan-kuku-pada-hewan-ternak-dalam-pandangan-pakar-fpp-undip.html>



Penyakit mulut dan kuku (PMK) saat ini tengah mewabah di Indonesia. Penyakit ini banyak menyerang hewan ternak dari mulai sapi, kerbau hingga domba atau kambing dan tergolong penyakit akut yang penyebarannya melalui infeksi virus dan mudah menular.

Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Ir. Bambang WHEP, MS., M.agr membentuk Tim Satgas Pengendalian PMK UNDIP dengan koordinator drh. Dian Wahyu Harjanti, Ph.D. Salah satu tupoksi Satgas PMK tersebut adalah memberikan Edukasi mengenai PMK dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa PMK tidak ditularkan ke manusia (bukan penyakit zoonosis), dan daging serta susu aman untuk di konsumsi. Edukasi dan Sosialisasi kepada masyarakat tersebut dilaksanakan melalui forum temu virtual dengan peternak binaan FPP Undip dan masyarakat, serta melalui media social.

drh. Dian menyampaikan penyakit mulut dan kuku (PMK) adalah penyakit infeksi virus (family *Picornaviridae*) yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap/belah (*cloven-hoofed*). Nama lain penyakit ini antara lain *aphthae epizootica* (AE), *foot and mouth disease* (FMD) . Virus PMK berukuran kecil (± 20 milimikron), tidak ber-amplop/ tanpa lapisan lemak dan memiliki capsid yang kuat sehingga virus ini sangat tahan terhadap desinfektan yang cara kerjanya melarutkan lemak. Berdasarkan sifat dan struktur virus tersebut tidak semua jenis desinfektan peka terhadap virus ini, dimana pada saat ini Kementerian Pertanian RI bekerjasama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) segera me-release SOP/ panduan pencegahan dan penanganan PMK termasuk jenis desinfektan yg direkomendasikan.

Penyakit PMK ini tidak ditularkan ke manusia atau bukan penyakit zoonosis sehingga yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah jangan sampai penyakit ini menyebar antar-ternak yang peka dan jangan sampai manusia menjadi

perantara atau penyebar kepada hewan yang peka. Pada manusia sendiri, tidak menimbulkan penyakit, namun dampaknya adalah pada hewan peka. Hewan yang peka terhadap PMK adalah sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, babi, unta dan beberapa jenis hewan liar seperti bison, antelope, jerapah dan gajah. Penyakit mulut dan kuku (PMK) adalah penyakit hewan menular yang paling penting dan paling ditakuti oleh semua negara di dunia. Penyakit ini dapat menyebar dengan sangat cepat dan mampu melampaui batas negara serta dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi. Untuk kerugian ekonomi berupa kematian ternak dan tingginya angka kesakitan, adanya hambatan perdagangan, terganggunya industri turisme, operasional pemberantasan penyakit, serta gangguan terhadap aspek sosial budaya dan keresahan masyarakat.

Ia mengatakan Indonesia pernah mengalami beberapa kejadian wabah PMK, mulai dari masuknya PMK ke Indonesia pada tahun 1887 di Malang, Jawa Timur yang selanjutnya menyebar ke berbagai daerah, sampai kejadian wabah terakhir di pulau Jawa pada tahun 1983 yang dimulai dari Jawa Timur. Dengan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan PMK, akhirnya Indonesia berhasil mendeklarasikan status bebas PMK pada tahun 1986 melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 260/Kpts/TN.510/5/1986 dan kemudian mendapatkan pengakuan dunia terhadap status bebas PMK tanpa vaksinasi sebagaimana tercantum dalam Resolusi Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) Nomor XI Tahun 1990.

Terdapat 7 serotipe PMK yang telah diidentifikasi yaitu tipe Oise (O); Allemagne (A); German Strain (C); South African territories 1 (SAT 1); SAT 2; SAT 3; dan Asia 1. Tipe O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 dan Asia 1 tersebut yang secara imunologis berbeda satu sama lain. Penyebab wabah PMK di Indonesia pada tahun 1983 hanya disebabkan oleh satu serotipe, yaitu serotipe O.

“Penyakit ini ditandai dengan adanya pembentukan vesikel atau lepuh dan erosi di mulut, lidah, gusi, nostril, puting, dan di kulit sekitar kuku, pincang dan bahkan kuku bisa terlepas, hipersalivasi, hewan lebih sering berbaring; pada ternak potong terjadi penurunan bobot badan dan pada ternak perah terjadi penurunan produksi susu yang drastis. Morbiditas biasanya tinggi mencapai 100%, namun mortalitas/tingkat kematian untuk hewan dewasa biasanya sangat rendah, akan tetapi pada hewan muda bisa mencapai 50%. Pada pedet, dengan pemeriksaan post mortem, bisa ditemukan adanya perubahan pada otot jantung (*myocardium*) berupa adanya garis-garis loreng, putih, abu-abu atau kekuningan yang sering disebut dengan istilah *tiger heart*. Pemeriksaan patologi ini hanya penting dilakukan untuk membuat diagnosa banding untuk penyakit lain selain PMK” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan hewan yang terinfeksi PMK dapat mengeksresikan virus pada cairan vesikel yang terkelupas, udara pernafasan, saliva, susu, semen, feces dan urin. Hewan tertular yang masih dalam status preklinis, yaitu belum menampakkan gejala klinis yang jelas ternyata dapat mengeksresikan virus. Kenyataan ini sangat berbahaya mengingat ada kemungkinan hewan yang belum menunjukkan gejala klinis tersebut dijual atau dipotong sehingga berpotensi menyebarkan penyakit pada hewan peka lainnya. Masa inkubasi dipengaruhi oleh strain virus PMK, jumlah virus dan rute infeksi. Untuk infeksi alami dalam jumlah yang besar, masa inkubasi berkisar antara 2-3 hari, akan tetapi apabila jumlahnya sedikit, maka inkubasi bisa mencapai 10-14 hari.

Hewan peka dapat tertular melalui jalur inhalasi (udara / pernafasan), ingesti (melalui pakan/ minum), perkawinan (alami ataupun buatan), serta kontak / bersentuhan. Penyebaran penyakit antar area sering disebabkan oleh lalu lintas hewan tertular, kendaraan, peralatan, orang dan produk hewan yang terkontaminasi virus PMK. Anjing, kucing, rodensia,

unggas, dan jenis burung tidak termasuk kedalam hewan yang peka terhadap virus PMK, namun dapat menularkan PMK kepada hewan peka secara mekanis, yaitu dengan memindahkan kontaminan. Pembuangan limbah dari tempat tertular, misalnya melalui aliran air / selokan/ sungai dapat mencemari lingkungan dan bisa menjadi sumber kontaminasi bagi kendaraan, hewan dan rumput. Berdasarkan literatur, penyebaran virus PMK dapat mencapai 10 km, yang dipengaruhi oleh perputaran udara.

Penyakit ini tidak ditularkan ke manusia (bukan penyakit zoonosis), sehingga daging dan susu aman untuk dikonsumsi. Terlebih lagi, budaya masyarakat Indonesia mengkonsumsi daging matang/ yang dimasak. Melalui proses pemanasan hingga bagian tengah daging mencapai 70°C selama 30 menit virus PMK akan mati. Selain itu, setelah ternak disembelih, secara alamiah terjadi proses rigor mortis yang mengakibatkan pH daging turun dibawah 5,9. Dan berdasarkan penelitian bahwa pada pH tersebut virus PMK inaktif. Sedangkan pada susu, upaya jaminan keamanan dilakukan minimal dengan pasteurisasi pada suhu 72°C selama 15 detik.

“Tidak semua sapi yang disembelih semua organnya bisa dikonsumsi. Sapi yang terinfeksi juga ada yang tidak menunjukkan gejala klinis atau bahasa kedokterannya adalah ‘sub-klinis’ atau mungkin memang belum sampai onsetnya. Seperti yg kita ketahui onsetnya bisa sampai 14 hari. Jika sapi sudah dipotong, organ yang ada ditubuh sapi terutama sumsum tulang dan tulangnya, kepala, limfoglandula dan jeroan harus dipisahkan dari daging dan ditangani dengan baik karena dapat mengandung virus. Penanganan yang direkomendasikan adalah perebusan mendidih selama minimal 30 detik terhadap organ tersebut. Jadi kalau daging tanpa tulang bisa dikatakan relative aman atau dapat diabaikan karena pedoman dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (*OIE / World Organization for Animal Health*) bahwa bagian yang paling aman adalah daging tanpa tulang dan tanpa limfoglandula” terang drh. Dian.

Ia menuturkan Pemerintah telah me-release Surat Edaran dan SOP Pelaksanaan kurban pada Idul Adha nanti. Panitia kurban harus mengetahui asal daerah ternak kurbannya. Pastikan asal hewan kurban bukan dari daerah wabah. Pematangan sebaiknya dilakukan di RPH (rumah Pematangan Hewan) milik Pemerintah yang diawasi oleh Dokter Hewan. Yang kita takutkan bukan dagingnya dan juga bukan pada orang-orang yang menyembelih dan menangani daging, akan tetapi pada sisa darah dan bahan bahan lain yang masuk kedalam selokan dan aliran air yang kemudian diminum oleh ternak-ternak yang peka maka menjadi penyebab penyebaran yang luar biasa. Di RPH, Dokter Hewan atau Paramedik Veteriner akan melakukan pemeriksaan ante-mortem (pemeriksaan sebelum disembelih/dipotong), serta harus mengetahui asal hewan dari mana (Daerah Wabah/Terancam/ Bebas). Pada kegiatan pematangan, hewan dari daerah bebas dipotong terlebih dahulu.

Hewan ternak yang berasal dari daerah wabah dan daerah terancam, wajib dipisahkan dan ditempatkan di kandang isolasi, meskipun tampak sehat. Pada area isolasi tersebut, Dokter Hewan akan melakukan pemeriksaan secara individu. Jika dinyatakan sehat, maka boleh dipotong dan setelahnya tetap dilakukan pemeriksaan post-mortem oleh Dokter Hewan.

Jika pada pemeriksaan kesehatan hasilnya positif PMK, maka yang harus dilakukan adalah tetap dipisahkan di kandang isolasi dan diobati. Tidak boleh dipotong di sembarang tempat karena dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan dan media penularan virus PMK melalui darah, urin, feses dan organ yang mengandung virus.

“Jadi ini bukan karena kita takut manusianya terinfeksi karena kita takut dari tulang, kepala, jerohan, feses, urin, darah dan lain-lain akan menjadi sumber pencemaran yang menginfeksi hewan atau ternak peka di lingkungannya. Jadi ini lebih banyak untuk kepentingan ternak yang merupakan sumber pangan protein hewani kita” tandasnya.

drh. Dian berpesan apabila masyarakat atau ibu-ibu membeli daging dari pasar, jangan dicuci tetapi langsung dimasak saja hingga mendidih minimal 30 menit. Agar jika pada permukaan daging tersebut terkontaminasi virus, tidak mencemari aliran air dari pencucian daging yang nantinya dapat menginfeksi hewan peka dilingkungan kita.

Penyimpanan daging dalam kulkas sangat bagus karena sama dengan proses pelayuan. Namun jika ingin disimpan di freezer /dibekukan, maka harus direbus dahulu misalnya diungkep dahulu kemudian dibekukan. Jika ingin menyimpan daging mentah dalam bentuk beku, maka sebelum dibekukan sebaiknya dimasukkan dahulu didalam pendingin selama 24 jam. Proses ini sama seperti proses pelayuan yang dilakukan dinegara-negara maju dalam pengendalian PMK.

“Ketika kita simpan di pendingin selama 24 jam artinya daging tersebut sudah melewati proses rigor mortis yang mana pH nya turun dibawah 5,9 dan bisa meng-inaktifkan virus. Setelah disimpan selama 24 jam di pendingin, kemudian dapat dibekukan atau dimasak. Sekali lagi, upaya yang kita lakukan ini adalah untuk hewan-hewan peka dilingkungan kita. Dimana hewan peka tersebut sebagian besar merupakan hewan ternak sumber protein hewani atau daging dan susu yang kita butuhkan untuk mendukung kesehatan dan imunitas tubuh manusia, serta berperan dalam tumbang-kembang kecerdasan generasi muda Indonesia” pungkasnya. (Lin-Humas)

Fakultas Peternakan dan Pertanian
Divisi Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner

Tips Penanganan PRODUK TERNAK

1. Daging yang dibeli dari pasar/supermarket langsung dimasak/dididihkan (tanpa dicuci).
2. Dipanaskan/ dimasak hingga suhu didalam daging min. 70°C selama 30 menit.

Susu dimasak mendidih atau minimal lakukan pasteurisasi (susu dipanaskan pada suhu 72 °C selama 15 detik)

DAGING & SUSU AMAN dan SEHAT

Bebas PMK
(Penyakit Mulut & Kuku)

Judul : Ternyata Ini Penyebab Penyakit Mulut dan Kuku Masuk ke RI

Penulis : Aulia Damayanti

Waktu : 25 Mei 2022

Sumber : <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6094322/ternyata-ini-penyebab-penyakit-mulut-dan-kuku-masuk-ke-ri>



Foto: Wisma Putra

Jakarta - Penyakit mulut dan kuku pada ternak kembali masuk ke Indonesia dan telah menyebar ke 15 provinsi di Indonesia. Pengamat Kesehatan Hewan Internasional Tri Satya Putri Naipospos menduga penyakit itu masuk ke Indonesia ada kaitannya dengan beberapa negara di Asia Tenggara yang melaporkan adanya peningkatan kasus PMK.

"Serotipe O, khususnya lineage Ind2001e merupakan yang dominan dalam beberapa tahun terakhir," jelas Tri Satya di Jakarta, dikutip Rabu (25/5/2022).

Menurut dokumen Report of the 24th SEACFMD National Coordinators Meeting tahun 2021 pada Website OIE Sub-Regional Representative for Southeast Asia menampilkan informasi kasus kejadian PMK yang disebabkan oleh virus O/ME-SA/Ind-2001 pertamanya di negara Kamboja, setelah sebelumnya juga ditemukan di hampir semua negara tertular PMK di Asia Tenggara.

Tri Satya menjelaskan peningkatan situasi penyakit mulut dan kuku di Asia Tenggara ini banyak dilaporkan pada ternak sapi, sedangkan pada ternak lainnya relatif kecil.

Ia menambahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian PMK adalah adanya lalu lintas ilegal ternak antar wilayah dan negara, rendahnya implementasi biosekuriti pada peternakan rakyat, kurangnya sumber daya manusia, serta dukungan logistik dan anggaran untuk vaksinasi yang tidak memadai.

"Kondisi ini meningkatkan risiko kejadian kasus dan penyebaran PMK antar wilayah" imbuhnya. Sehingga menurutnya peningkatan kasus di Kawasan Asia Tenggara sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kemungkinan masuknya PMK ke Indonesia.

"Serotipe yang sama antara virus PMK di Indonesia dan yang dominan di Asia Tenggara menunjukkan bahwa sumbernya dari Kawasan tersebut. Introduksi virus bisa lewat berbagai cara tapi risiko paling tinggi adalah dari lalu lintas ilegal" tegas Tri Satya yang juga ketua komisi ahli kesehatan hewan.

Tri Satya berharap agar hasil analisis genetik molekuler yang dapat membuktikan sumber virus PMK yang masuk ke Indonesia dapat segera tersedia, sehingga menjawab berbagai spekulasi terkait sumber virus PMK yang saat ini terjadi di Indonesia.

Ia juga berharap agar Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk segera memiliki program pengendalian resmi PMK (official disease control program) yang diakui Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) dan menerapkan pengendalian dan pemberantasan PMK secara bertahap atau progressive control pathway (PCP).

"Perlu diterapkan PCP untuk PMK, agar secara bertahap kita bisa kendalikan dan pada akhirnya memberantas PMK di Indonesia," pungkasnya.

Berdasarkan data dari OIE, penyakit mulut dan kuku (PMK) di Asia Tenggara mengalami kecenderungan peningkatan pada periode 2020-2022. Hal tersebut tidak terlepas juga dari kontribusi adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya pembatasan kegiatan termasuk berkurangnya sumberdaya untuk pengendalian dan penanggulangan PMK.

Judul : Pusvetma Surabaya Siap Produksi Vaksin PMK

Penulis : Dinas Kominfo Jawa Timur

Waktu : 30 Mei 2022

Sumber : <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/pusvetma-surabaya-siap-produksi-vaksin-pmk>



Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini sedang proses pembuatan vaksin untuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Jatim Newsroom- Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini sedang proses pembuatan vaksin untuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga dalam keterangannya, Senin (30/5/2022).

“Bapak Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah mengintruksikan langsung kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan agar Pusvetma segera memproduksi vaksin setelah munculnya kasus kejadian PMK di Jawa Timur sebelum Hari Raya Idul Fitri lalu,” ungkap Kuntoro.

Dikatakannya, dengan vaksinasi yang efektif, tindakan pengendalian yang ketat, sistematis dan berkelanjutan telah terbukti pemberantasan PMK di sebagian besar negara menjadi bebas PMK.

"Saya telah menyaksikan sendiri saat ini proses pengembangan produksi vaksin PMK sedang berlangsung sejak Bapak Menteri menginstruksikan Pusvetma memproduksi kembali vaksin PMK," ujarnya.

Kuntoro menambahkan, vaksinasi memang menjadi solusi dan harapan bagi para peternak di seluruh Indonesia. Dengan adanya vaksin wabah PMK, Indonesia diharapkan bisa segera dapat disembuhkan dan Indonesia kembali menjadi negara bebas PMK.

Sebagai informasi, kemampuan Indonesia dalam produksi vaksin PMK dimulai sejak tahun 1952 dan melakukan program vaksinasi massal sejak tahun 1964, maka Indonesia sudah bebas dari PMK sejak tahun 1986 dan diakui di

lingkungan ASEAN sejak 1987, serta diakui secara internasional oleh organisasi Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties-OIE) sejak 1990.

Sementara itu, Kepala Pusvetma, Edy Budi Susila menjelaskan, proses pengembangan produksi vaksin PMK oleh Pusvetma telah berlangsung sejak Bapak Menteri Pertanian menginstruksikan diproduksi kembali vaksin PMK.

Ia jelaskan, proses pengembangan produksi vaksin PMK oleh Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) sejatinya pernah dilakukan untuk membebaskan Indonesia dari penyakit mulut dan kuku pada 1983-1986. Bertolak pada pengalaman tersebut, ia meyakini bahwa Pusvetma dapat mengembangkan vaksin dalam negeri guna pengendalian PMK ke depan.

Lebih lanjut Edi sampaikan, seiring dengan kejadian wabah masuknya PMK, proses pengembangan produksi vaksin di Pusvetma dimulai kembali dan saat ini telah memasuki purifikasi isolate dan phase ke-6.

“Proses pembuatan vaksin PMK ini dengan menggunakan teknologi tissue culture dengan sel BKH 21,” ungkap Edy. “Vaksin bersifat inaktif dan diformulasikan dengan adjuvant,” imbuhnya.

Kendati demikian, Edi mengatakan, pengembangan produksi vaksin PMK ini memerlukan proses karena Pusvetma sebelumnya tidak memproduksi vaksin penyakit tersebut sejak Indonesia dinyatakan bebas PMK tanpa vaksinasi oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) pada tahun 1990.

Dengan berbagai tantangan yang ada, Edy memastikan, Tim Pusvetma akan mampu melakukan pengembangan produksi vaksin yang dibutuhkan walaupun memerlukan berbagai penyesuaian. “Pusvetma akan memaksimalkan kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang ada di fasilitas produksi vaksin Pusvetma,” ungkap Edy.

Ia katakan, Pusvetma akan mengerahkan semua pegawai untuk bahu-membahu dalam bekerja, agar vaksin yang ditunggu oleh seluruh peternak ini dapat segera terealisasi.

“Kami optimis dengan pengalaman Indonesia sebelumnya dan kerjasama dengan para dokter hewan senior, kita akan dapat segera memproduksi vaksin PMK tersebut,” pungkasnya. (jal/hjr)



Judul : Astaga! Ternyata PMK Sudah Masuk RI Lagi Sejak Tahun 2015

Penulis : Damiana Cut Emeria

Waktu : 14 July 2022

Sumber : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220714141350-4-355643/astaga-ternyata-pmk-sudah-masuk-ri-lagi-sejak-tahun-2015>



Foto: Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang dengan menggunakan pakaian alat pelindung diri melakukan pengecekan kesehatan sapi yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) di area Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Banten, Rabu (15/6/2022). (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ombudsman RI mengungkapkan, penyakit mulut dan kuku (PMK) sebenarnya sudah masuk kembali ke Indonesia sejak tahun 2015. Dimana, sebelumnya Indonesia sudah dinyatakan bebas PMK pada tahun 1990 oleh OIE (World Organization for Animal Health).

"Berdasarkan informasi dan dokumen yang dikumpulkan Ombudsman, PMK kembali masuk ke Indonesia di tahun 2015. Namun informasi ini tidak disampaikan ke publik, atau ditutupi oleh pemerintah saat itu," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (14/7/2022).

Hanya saja, imbuh dia, terdapat hal positif yang bisa diambil pelajaran atas penanggulangan PMK saat itu.

"Pemerintah berhasil memberantas PMK dengan menerapkan vaksinasi masal dan serempak, dibarengi dengan pengendalian lalu lintas hewan rentan. Sehingga penularannya dapat dihentikan dalam waktu sangat cepat," kata Yeka.

Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah tidak menindaklanjuti kejadian itu dengan tugas yang seharusnya diselesaikan. Yaitu, peningkatan kewaspadaan secara extraordinary. Mulai dari Badan Karantina tidak boleh lalai dalam pemasukan hewan dan produk hewan ke seluruh wilayah Indonesia.

"Proses lalu lintas, harusnya diperketat dengan kewaspadaan tinggi. Kedua, pemerintah pusat dan daerah memperkuat lembaga otoritas veteriner. Alih-alih diperkuat, banyak sekali pemerintah daerah yang menghapuskan Dinas Peternakan, dan tidak memiliki pejabat otoritas veteriner," tukasnya.

Yeka mengatakan, lemahnya fungsi pengawasan Badan Karantina terlihat dari munculnya beberapa kasus wabah penyakit ternak di Indonesia.

"Sejak akhir tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 Indonesia telah dimasuki 3 jenis penyakit eksotik dan menyebar di dalam negeri. Terdapat 3 Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) tentang kejadian wabah dimaksud. Yaitu Kepmentan No. 820 Tahun 2019 tentang Wabah Demam Babi Afrika (African Swine Fever/ASF). Kepmentan No 242 Tahun 2022 tentang wabah Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin Disease/LSD). Kepmentan No 403 Tahun 2022, dan Kempentan No 404 Tahun 2022 Tentang Wabah PMK di Provinsi Jatim dan Provinsi Aceh," ujarnya.



Yeka mengatakan, ketiga penyakit hewan menular tersebut yaitu ASF, LSD dan PMK adalah penyakit yang sangat merugikan industri peternakan di Indonesia.

Sementara itu, siagapmk.id mencatat, hingga pukul 14.12 WIB hari ini, Kamis (14/7/2022), penyebaran PMK sudah menjangkau ke 247 kabupaten/kota meluas di 22 provinsi. Tercatat ada 2.436 ekor ternak yang mati, sementara vaksinasi baru mencapai 498.900 ekor.